

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan perkenaan-Nyalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta secara aktif baik dari aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat umum maupun masyarakat dunia usaha. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan LKjIP sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem LKjIP sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Laporan Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah kabupaten Parigi Moutong. Dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan sisi lain, merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Akhirnya, semoga LKjIP tahun 2024 ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang nyata tentang evaluasi pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2024.

Parigi, 26 Maret 2025

Pj. Bupati Parigi Moutong



RICHARD ARNALDO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis	26
2.2 Visi dan Misi	27
2.3 Tujuan dan Sasaran	29
2.4 Indikator Kinerja Utama	30
2.5 Penetapan Kinerja.....	30
2.6 Perjanjian Kinerja	31
2.7 Cascading Kinerja	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	38
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	40
3.3 Capaian Indikator Program dan Kegiatan.....	56
3.4 Realisasi Anggaran.....	57
BAB IV	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Tindak Lanjut	58
LAMPIRAN I	59
LAMPIRAN II	64
LAMPIRAN III	65
LAMPIRAN IV	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong	3
Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Parigi Moutong.....	4
Tabel 1.3 Jarak Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Parigi Moutong	6
Tabel 1.4 Keadaan Penduduk Kabupaten Parigi Moutong Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Kabupaten Parigi Moutong, 2024	8
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Parigi Moutong Parigi Moutong 2024	9
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Parigi Moutong.....	17
Tabel 1.7 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Parigi Moutong	18
Tabel 1.8 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Parigi Moutong	19
Tabel 1.9 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah	20
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.....	29
Tabel 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	39
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	41
Tabel 3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Pertama.....	43
Tabel 3.4 Nilai SAKIP Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	43
Tabel 3.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Keempat	48
Tabel 3.6 Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Ketiga	52
Tabel 3.7 Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Keempat	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Batas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong	3
Gambar 1.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Parigi Moutong	5
Gambar 2.1 Visi Kabupaten Parigi Moutong	32
Gambar 2.2 Misi Kabupaten Parigi Moutong.....	33
Gambar 2.3 Cascading Misi I	34
Gambar 2.4 Cascading Misi II.....	35
Gambar 2.5 Cascading Misi III.....	36
Gambar 2.6 Cascading Misi IV.....	37

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja suatu instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada pemberi amanat. Pertanggungjawaban ini merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akuntabilitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Parigi Moutong menyajikan capaian isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan beberapa hal yang perlu perbaikan. Untuk itu, seluruh program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penetapan Kinerja (TAPKIN), dan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Parigi Moutong secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024-2026 seperti penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Sedangkan penilaian kinerja pada LKjIP akan ditekankan pada pencapaian sasaran. Capaian kinerja sasaran Kabupaten Parigi Moutong merupakan kontribusi pencapaian sasaran masing-masing satuan kerja. Sasaran tersebut kemudian akan dikelompokkan dalam tujuan yang sesuai. Hal ini berarti, LKjIP Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 merupakan suatu kombinasi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD Kabupaten Parigi Moutong.

Capaian kinerja indikator sasaran instansi dilakukan dengan mengambil capaian indikator kinerja *outcome* dari Program/kegiatan. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah untuk mencapai sasaran atau dengan kata lain untuk mencapai suatu sasaran tertentu, maka harus dilakukan dengan satu atau beberapa kegiatan.

Sasaran dari instansi akan dikelompokkan ke dalam masing-masing tujuan, yaitu Mewujudkan Konsepsi *Good Governance* melalui Peningkatan Kapasitas Pelayanan Aparatur Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat, Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dari KKN, Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Membiayai Proses Pembangunan Daerah yang Semakin Meningkatkan Volumennya, Tumbuhkembangnya Kesadaran Masyarakat untuk Turut Serta dan Berpartisipasi dalam Pembangunan, Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Terwujudnya Pengembangan Sistem Agrobisnis dan Agroindustri dan Tercukupinya Ketahanan Pangan, Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat melalui Pengembangan Infrastruktur, Transportasi dan Komunikasi, dan Terciptanya Keseimbangan antara Eksploitasi Produksi dengan Daya Dukung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Nilai Capaian sasaran di ukur berdasarkan Misi 1, Misi 2, Misi 3, Misi 4 dan ditetapkan 16 Indikator Sasaran yang dapat diukur. Selain nilai capaian target indikator untuk menuju sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Parigi Moutong juga berusaha mengungkapkan capaian kinerja makro berupa Pertumbuhan PDRB Kabupaten Parigi Moutong dan Pendapatan Perkapita, Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (Metode Perhitungan Baru). Pengungkapan indikator makro dimaksudkan untuk mengetahui besaran makro yang merupakan dampak (*impact*) dari seluruh aktivitas pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. Karenanya, indikator makro bukan merupakan kontribusi langsung dari instansi yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. Keberhasilan atau kegagalannya tidak bisa didistribusikan kepadamasing-masing instansi.

Oleh karena itu, perbaikan yang terus menerus (*continuous improvement*) akan kami lanjutkan seperti pengembangan sistem pengukuran kinerja, peningkatan SDM, pengembangan anggaran berbasis kinerja dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di masa yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa azas - azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban.

Juga sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Tiga pilar *Good Governance* antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi.

1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

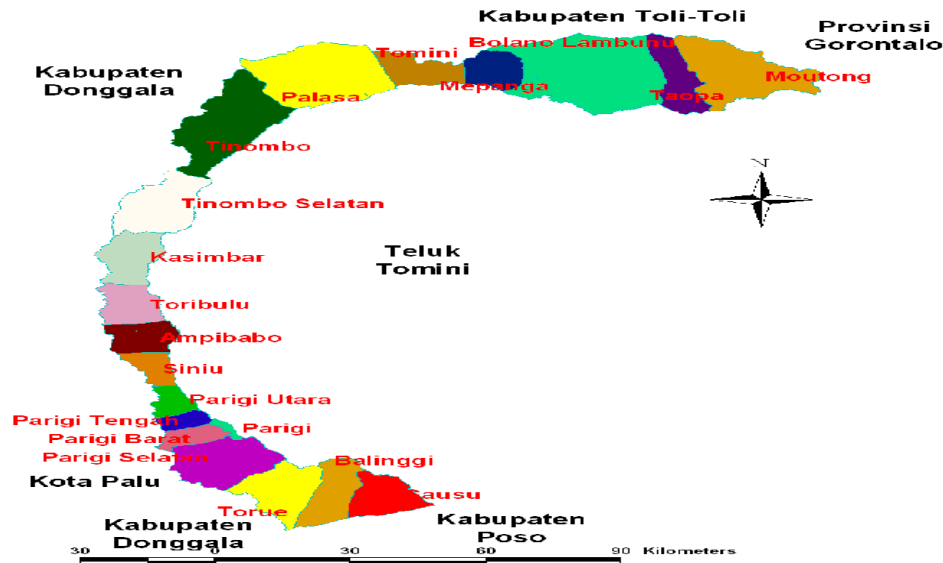
1. Kondisi Geografis

Kabupaten Parigi Moutong merupakan Daerah Otonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dan sudah melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama kurun waktu 13 Tahun, Kabupaten Parigi Moutong dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah yang diresmikan di Jakarta tanggal 10 April 2004. Luas wilayah Kabupaten Parigi Moutong adalah 6.231,85 Km² yang terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) Kecamatan, 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Desa) dan 5 (Lima) Kelurahan. Secara Geografis Kabupaten Parigi Moutong terletak pada 0.75 ° LU - 1°LS dan 120°- 121,5 °BT dan dilalui oleh garis Khatulistiwa yang membentang dari Desa Maleali Kecamatan Sausu sampai dengan Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong sepanjang ± 472 Km, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Batas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong

ARAH	PERBATASAN
Utara	Berbatasan Dengan Kabupaten buol, Kabupaten Tolitoli, dan Provinsi Gorontalo
Selatan	Berbatasan Dengan Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi
Barat	Bertasan Dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu
Timur	Berbatasan dengan Teluk Tomini

Batas wilayah Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada peta sebagai berikut :



Gambar 1.1
Peta Batas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong

Sumber Data : BPS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Secara administratif, Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan, 278 Desa, 5 (Lima) Kelurahan, 1.280 RW, dan 1.468 RT. Kedua puluh tiga kecamatan tersebut terdiri atas Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, Parigi Selatan, Parigi Tengah, Parigi Barat, Parigi Utara, Siniu, Ampibabo, Toribulu, Kasimbar, Tinombo Selatan, Tinombo, Sidoan, Tomini, Palasa, Mepanga, Ongka Malino, Bolano, Bolano Lambunu, Taopa, Moutong

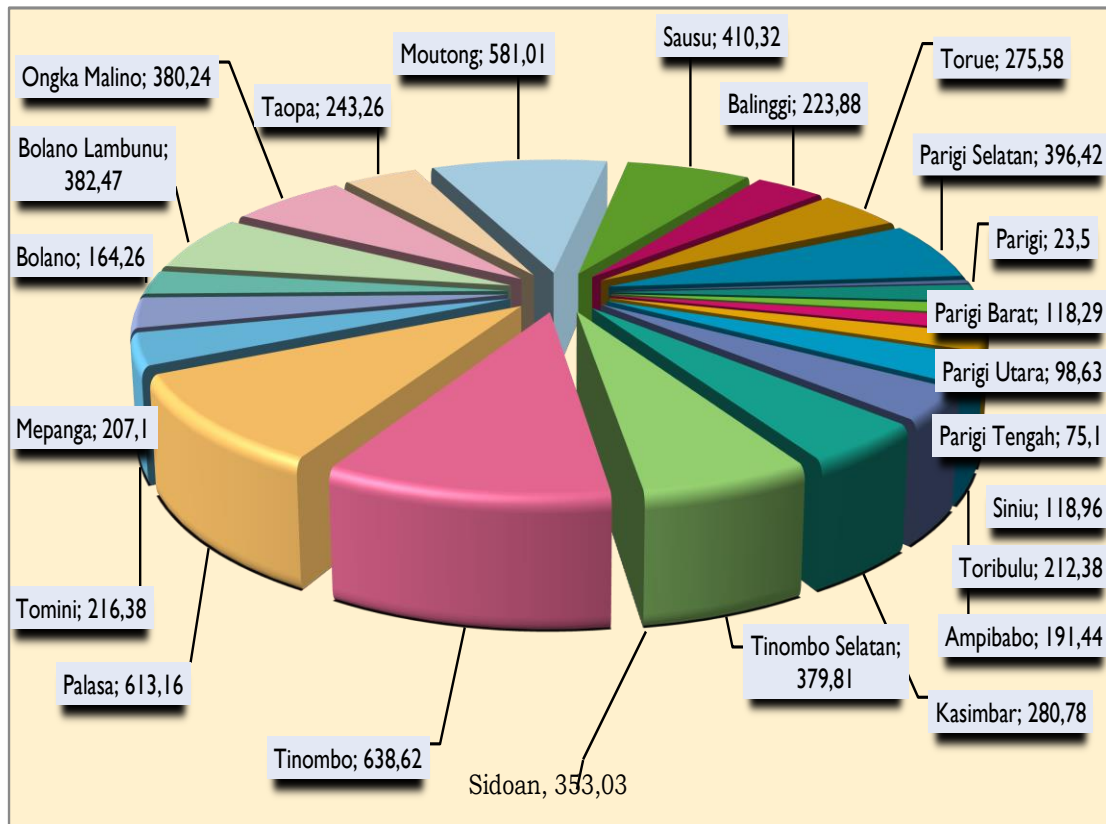
dan Parigi sebagai ibukota kabupaten. Luas wilayah Kabupaten Parigi Moutong menurut masing-masing kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 1.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1	Sausu	410,32	6,58
2	Torue	275,84	4,43
3	Balinggi	223,88	3,59
4	Parigi	23,50	0,38
5	Parigi Selatan	396,42	6,36
6	Parigi Barat	118,29	1,90
7	Parigi Utara	98,63	1,58
8	Parigi Tengah	75,10	1,21
9	Ampibabo	191,44	3,07
10	Kasimbar	280,78	4,51
11	Toribulu	212,38	3,41
12	Siniu	118,96	1,91
13	Tinombo	285,59	4,58
14	Tinombo Selatan	379,81	6,09
15	Sidoan	353,03	5,67
16	Tomini	216,38	3,47
17	Mepanga	207,10	3,32
18	Palasa	613,16	9,84
19	Moutong	581,01	9,32
20	Bolano Lambunu	382,47	6,14
21	Taopa	243,26	3,90
22	Bolano	164,26	2,64
23	Ongka Malino	380,24	6,10
Parimo Moutong		6.231,85	100.00

Sumber Data : BPS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Jarak terjauh (290 Km) antara ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Moutong, dan yang terdekat adalah Kecamatan Parigi Barat dengan jarak tempuh 4 Km dari ibukota Kabupaten. Secara geografis, Kabupaten Parigi Moutong cukup strategis karena terletak di daerah lintas Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Luas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong tercatat seluas 6231,85 Ha, terdiri dari hutan lindung seluas 148,690.54 Ha, hutan cagar alam dengan luas sebesar 56.431,57 Ha, hutan produksi terbatas seluas 23.555,99 hutan produksi tetap seluas 110.008,09 Ha, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 14.306,47 Ha, dan areal penggunaan lain-lain seluas 250,544 Ha. Kabupaten Parigi Moutong mempunyai luas wilayah seluas 6.231,85 Km². Batas wilayah administrasi Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut:



Gambar 1.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Parigi Moutong

Sumber Data : BPS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Jarak ibu kota Kabupaten Parigi Moutong dengan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.3
Jarak Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan
Di Kabupaten Parigi Moutong

No	Kecamatan	IbuKota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Kecamatan	Dapat ditempuh melalui
1	Sausu	Sausu	52	Darat
2	Torue	Torue	29	Darat
3	Balinggi	Malakosa	33	Darat
4	Parigi	Masigi	0	Darat
5	Parigi Selatan	Dolago	8	Darat
6	Parigi Barat	Parigimpuu	4	Darat
7	Parigi Utara	Toboli	16	Darat
8	Parigi Tengah	Binangga	9	Darat
9	Ampibabo	Ampibabo	44	Darat
10	Kasimbar	Kasimbar	86	Darat
11	Toribulu	Toribulu	75	Darat
12	Siniu	Siniu	37	Darat
13	Tinombo	Tinombo	167	Darat
14	Tinombo Selatan	Manilili	113	Darat
15	Sidoan	Sidoan	149	Darat
16	Tomini	Tomini	200	Darat
17	Mepanga	Mepanga	214	Darat
18	Palasa	Palasa	185	Darat
19	Moutong	Moutong	290	Darat
20	Bolano Lambunu	Lambunu	260	Darat
21	Taopa	Taopa	278	Darat
22	Bolano	Bolano	255	Darat
23	Ongka Malino	Ongka	240	Darat

Sumber Data : BPS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang jaraknya relatif dekat dengan Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Parigi Moutong dipengaruhi oleh musim/iklim yaitu musim hujan yang terdiri antara bulan Oktober – Maret dan musim kemarau/panas terjadi pada bulan April – September dan suhu udara maksimum terendah terjadi pada bulan November pada kisaran (31,6°C). sementara suhu udara minimum tertinggi terjadi pada bulan Oktober pada kisaran 23,8° dan suhu udara minimum terendah terjadi pada bulan juni yang mencapai 22,1°, curah hujan rata-rata 98 mm/Thn.

2. Kondisi Demografis

Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya, Jumlah penduduk suatu Daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negative bila dilihat dari dimensi waktu dan Daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumberdaya manusia rendah, merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda Ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan persebaran penduduk di Kabupaten Parigi Moutong tidak merata diseluruh kecamatan, dimana kecamatan Parigi sebagai pusat pemerintahan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat yakni sebesar 31.141 Jiwa sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada kecamatan Parigi utara yakni 7.198 jiwa, Adapun jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan sensus Penduduk tahun 2020 berjumlah 446.712 Jiwa, dan berikut jumlah

penduduk yang tersebar disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut :

Tabel 1.4
Keadaan Penduduk Kabupaten Parigi Moutong Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Kabupaten Parigi Moutong, 2023

NO	Kecamatan	Data BPS Parigi Moutog Dalam Angka 2024		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sausu	11260	10462	21722
2.	Torue	10430	9999	20429
3.	Balinggi	8856	8670	17526
4.	Parigi	15764	15359	31273
5.	Parigi Selatan	11972	11484	23456
6.	Parigi Barat	4371	4161	8532
7.	Parigi Utara	3473	3326	7032
8.	Parigi Tengah	4639	4515	9358
9.	Ampibabo	11652	11063	23181
10.	Kasimbar	11898	11285	23677
11.	Toribulu	8946	8438	17733
12.	Siniu	5175	4806	10192
13.	Tinombo	10357	9817	20331
14.	Tinombo Selatan	14290	13473	28259
15.	Sidoan	7 580	6 960	14624
16.	Tomini	9 643	9 140	19025
17.	Mepanga	15 218	14 433	30157
18.	Palasa	13 493	12 603	26278
19.	Moutong	10 839	10 438	21541
20.	Bolano Lambunu	10 838	10 096	21059
21.	Taopa	7 057	6 821	14132
22.	Bolano	8 279	7 805	16 271
23.	Ongka Malino	10 724	9 906	20924
Jumlah		225 888	214 127	446712

Sumber Data : BPS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Perkembangan penduduk menurut kelompok umur di kabupaten Parigi moutong pada tahun 2024 dengan angka tertinggi yaitu terdapat pada usia 15-19 tahun dengan jumlah 41.382 Jiwa terdiri dari 21.386 jiwa laki-laki dan 19.996 jiwa perempuan sedangkan jumlah terkecil ada pada kelompok umur 75+ dengan jumlah 5.844 jiwa terdiri dari 3.070 jiwa laki-laki dan 2.774 jiwa perempuan, Adapun perkembangan penduduk menurut kelompok umur dapat di lihat pada table sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Parigi Moutong Parigi Moutong 2023

Kelompok Umur	Penduduk (orang)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	16409	15871	32280
5-9	19283	18363	38119
10-14	20783	19942	40725
15-19	21386	19996	41382
20-24	19914	19042	38956
25-29	19201	18367	37568
30-34	17666	17484	35150
35-39	17476	16786	34262
40-44	16962	16403	33365
45-49	15303	14483	29786
50-54	13072	12333	25505
55-59	10360	9700	20060
60-64	8137	7359	15496
65-69	5761	5212	10973
70-74	33906	3435	7341
75+	3070	2774	5844
Jumlah	228689	218023	446712

Sumber Data : BPS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

3. Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2016 sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah melaksanakan unsur penunjang sekretariat daerah. Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 3. Bagian Hukum
 - 4. Bagian Kerja Sama
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
 - 1. Bagian Perekonomian
 - 2. Bagian Pembangunan
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - 4. Bagian Sumber Daya Alam
 - c. Asisten Administrasi Umum
 - 1. Bagian Organisasi
 - 2. Bagian Umum
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sekretariat DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan unsur penunjang sekretariat DPRD;

- Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan unsur penunjang pengawasan.
- Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air, dan sub urusan drainase;
 - 4) Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman, Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Parigi moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 6) Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 10) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
- 11) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan;
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 13) Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 15) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan perizinan;
- 17) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
- 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- 19) Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

- 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - 21) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong dengan tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pangan;
 - 22) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Parigi Moutong dengan tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Badan Daerah terdiri dari;
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Parigi Moutong dengan tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan daerah serta penelitian pada bidang kelitbang;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong dengan tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang Keuangan;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Parigi Moutong dengan tipe A, Melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan Pajak Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong, tipe B. Melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Parigi Moutong tipe A, melaksanakan Sebagian fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Kecamatan, yang terdiri dari 23 Kecamatan melaksanakan unsur penunjang kewilayahan antara lain;
 1. Kecamatan Ampibabo tipe A;
 2. Kecamatan Balinggi tipe A;
 3. Kecamatan Bolano tipe A;
 4. Kecamatan Bolano Lambunu tipe A;

5. Kecamatan Kasimbar tipe A;
6. Kecamatan Mepanga tipe A;
7. Kecamatan Moutong tipe A;
8. Kecamatan Ongka Malino tipe A;
9. Kecamatan Palasa tipe A;
10. Kecamatan Parigi tipe A;
11. Kecamatan Parigi Barat tipe A;
12. Kecamatan Parigi Selatan tipe A;
13. Kecamatan Parigi Tengah tipe A;
14. Kecamatan Parigi Utara tipe B;
15. Kecamatan Sausu tipe A;
16. Kecamatan Sidoan tipe A;
17. Kecamatan Siniu tipe A;
18. Kecamatan Taopa tipe A;
19. Kecamatan Tinombo tipe A;
20. Kecamatan Tinombo Selatan tipe A;
21. Kecamatan Tomini tipe A;
22. Kecamatan Toribulu tipe A; dan
23. Kecamatan Torue tipe A.

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah kabupaten dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola Minis

serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah (BLUD). Adapun Rumah sakit serta Puskesmas yang ada di Kabupaten Parigi Moutong adalah;

- **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**
 1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi
 2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Tombolotutu Tinombo
 3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bulunye Napoa'e Moutong
- **PUSKESMAS**
 1. Puskesmas Sausu
 2. Puskesmas Balinggi
 3. Puskesmas Torue
 4. Puskesmas Sumber Sari
 5. Puskesmas Lompe Ntodea
 6. Puskesmas Parigi
 7. Puskesmas Pangi
 8. Puskesmas Siniu
 9. Puskesmas Ampibabo
 10. Puskesmas Kasimbar
 11. Puskesmas Sienjo
 12. Puskesmas Sidoan
 13. Puskesmas Tinombo
 14. Puskesmas Tada
 15. Puskesmas Tomini
 16. Puskesmas Sigenti
 17. Puskesmas Ongka
 18. Puskesmas Palasa
 19. Puskesmas Lambunu 1
 20. Puskesmas Lambunu 2
 21. Puskesmas Taopa
 22. Puskesmas Mepanga

23. Puskesmas Moutong

24. Puskesmas Anutapura Pelawa

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli. Staf ahli tersebut berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara Administratif di koordinasikan oleh sekretaris Daerah. Adapun Staf Ahli di maksud Antara lain sebagai berikut:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Staf Ahli Bupati bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah

4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2023 sebanyak 5955 orang berdasarkan golongan dan jenis kelamin yang terdiri dari, sebagai berikut :

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Parigi Moutong

Jabatan Occupation (1)	2023		Jumlah Total (4)
	Laki-laki Male (2)	Perempuan Female (3)	
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama <i>Senior Executives</i>	—	—	—
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya <i>Middle Executives</i>	—	—	—
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama <i>Junior Executives</i>	22	8	30
Administrator/ <i>Administrator</i>	129	70	199
Pengawas/ <i>Supervisor</i>	211	143	354
Eselon V/ <i>5th Echelon</i>	—	—	—
Jabatan Fungsional Dosen <i>Certain Functional Position for Lecturer</i>	1	—	1
Jabatan Fungsional Guru <i>Certain Functional Position for Teacher</i>	822	1.407	2.229
Jabatan Fungsional Medis <i>Certain Functional Position for Medical Field</i>	134	706	840
Jabatan Fungsional Teknis <i>Certain Functional Position for Technical Field</i>	261	235	496
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana <i>General Functional Position</i>	952	854	1.806
Jumlah/ Total	2.532	3.423	5.955

Sumber Data : BPS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Parigi Moutong

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	2023		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar (SD) <i>Primary School</i>	12	—	12
Sekolah Menengah Pertama (SMP) <i>Junior High School</i>	10	2	12
Sekolah Menengah Atas (SMA) <i>Senior High School</i>	653	433	1.086
Diploma I/Akta I <i>Diploma I/ Akta I</i>	6	33	39
Diploma II/Akta II <i>Diploma II/ Akta II</i>	62	88	150
Diploma III/Akta III <i>Diploma III/ Akta III</i>	140	591	731
Diploma IV/Akta IV <i>Diploma IV/ Akta IV</i>	15	52	67
S1/Sarjana <i>Under Graduate/Bachelor</i>	1.481	2.116	3.597
S2/Pasca Sarjana <i>Graduate</i>	152	108	260
S3/Doktor/Ph.D <i>Post Graduate</i>	1	—	1
Jumlah/ Total	2.532	3.423	5.955

Sumber Data : BPS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Tabel 1.8
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Parigi Moutong

Pangkat/Golongan/Ruang <i>Hierarchy</i>		2023		Jumlah <i>Total</i>
		Laki-laki <i>Male</i>	Perem- puan <i>Female</i>	
(1)		(2)	(3)	(4)
Golongan I/ Range I		20	—	20
1. I/A	(Juru Muda/ <i>Junior Clerk</i>)	...	...	...
2. I/B	(Juru Muda Tingkat I/ <i>First Class Junior Clerk</i>)	1	—	1
3. I/C	(Juru/ <i>Clerk</i>)	6	—	6
4. I/D	(Juru Tingkat I/ <i>First Class Clerk</i>)	13	—	13
Golongan II/ Range II		550	500	1.050
5. II/A	(Pengatur Muda/ <i>Junior Supervisor</i>)	27	17	44
6. II/B	(Pengatur Muda Tingkat I/ <i>First Class Junior Supervisor</i>)	72	59	131
7. II/C	(Pengatur/ <i>Supervisor</i>)	241	200	441
8. II/D	(Pengatur Tingkat I/ <i>First Class Supervisor</i>)	210	224	434
Golongan III/ Range III		1.397	2.342	3.739
9. III/A	(Penata Muda/ <i>Junior Superintendent</i>)	290	482	772
10. III/B	(Penata Muda Tingkat I/ <i>First Class Junior Superintendent</i>)	308	518	826
11. III/C	(Penata/ <i>Superintendent</i>)	351	627	978
12. III/D	(Penata Tingkat I/ <i>First Class Superintendent</i>)	448	715	1.163
Golongan IV/ Range IV		565	581	1.146
13. IV/A	(Pembina/ <i>Administrator</i>)	234	272	506
14. IV/B	(Pembina Tingkat I/ <i>First Class Administrator</i>)	305	297	602
15. IV/C	(Pembina Utama Muda/ <i>Junior Administrator</i>)	23	10	33
16. IV/D	(Pembina Utama Madya/ <i>Middle Administrator</i>)	2	2	4
17. IV/E	(Pembina Utama/ <i>Senior Administrator</i>)	1	—	1
Jumlah/ Total		2.532	3.423	5.955

Sumber Data : BPS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatus Sipil Negara tersebut sudah cukup untuk mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong. Peningkat kualitas SDM terus dilakukan peningkatan baik dari segi softskill maupun hardskill dari aparatur dengan harapan kedepan akan adanya peningkatan secara bertahap dari segi kualitas/kompetensi SDM.

1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal Perubahan RPD berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan Kabupaten Parigi Moutong.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan dan diuraikan secara deskriptif-analisis sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagai berikut:

Tabel 1.9
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya rata-rata lama sekolah	1. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan Pendidikan	1. Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi standar nasional; 2. Keterbatasan kuantitas dan kompetensi SDM tenaga kependidikan; 3. Kurangnya ketersediaan alat peraga pendidikan tingkat PAUD (alat permainan edukatif, dll).
		2. Masih terdapat penduduk usia sekolah yang tidak/belum sekolah	1. Terbatasnya transportasi dari daerah terpencil menuju pusat pendidikan ;

			2. Terbatasnya bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin.
2	Masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH)	1. Kualitas Layanan Kesehatan belum optimal	1. Keterlambatan rujukan karena ibu hamil yang tinggal di pemukiman pegunungan/keadaan Geografis; 2. Masih tingginya kasus kematian Ibu dan bayi; 3. Kompetensi Bidan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal masih kurang; 4. Rasio tenaga medis persatuan penduduk belum memadai.
		2. Rendahnya kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh masyarakat	1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
		3. Tingginya Prevalensi Stunting	1. Kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah; 2. Faktor ekonomi yang rendah, kurangnya asupan gizi bagi balita, sanitasi yang buruk, pola asuh anak yang salah.
3	Belum terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar yang memadai	1. Sistem jaringan infrastruktur belum dapat menunjang pelayanan sosial dan ekonomi secara optimal	1. Kurangnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik; 2. Kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan infrastruktur masih terbatas 3. Tingginya dampak abrasi pantai sepanjang pesisir teluk tomini 4. Belum optimalnya fungsi irigasi 5. Belum optimalnya fungsi drainase
		2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi dan listrik).	1. Masih adanya rumah tinggal yang belum bersanitasi; 2. Belum terpenuhinya Cakupan listrik (rasio elektrifikasi); 3. Cakupan pelayanan air minum di daerah

			perdesaan dan perkotaan belum memadai.
4	Belum terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar yang mantap	1. Ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun/disediakan dan prasarana dasar yang ada	1. Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni; 2. Masih banyaknya kondisi PSU permukiman yang kurang diperhatikan/terabaikan.
		2. Masih adanya Kawasan kumuh yang belum ditangani	1. Masih ada lokasi kumuh; 2. Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat, yang tidak menghargai lingkungan tempat tinggalnya.
5	Masih tingginya Indeks Resiko Bencana, dan Indeks Kapasitas Daerah	1. Kinerja pelayanan penanggulangan bencana belum optimal.	1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana secara terpadu dan berkelanjutan belum optimal; 2. Sistem pencegahan dan peringatan dini terhadap bencana belum maksimal dijalankan;
6	Rendahnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Masih rendahnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; 2. Penanganan Sampah belum optimal; 3. Peran serta masyarakat dan rumah tangga dalam pengelolaan sampah belum optimal; 4. Masih Kekurangan sarana dan prasarana penanganan sampah (mobil dum truk dan mobil amrol); 5. Kapasitas TPA semakin terbatas.
7	Belum optimalnya Peningkatan Nilai Investasi	1. Masih kurangnya pelayanan perizinan terkait penanaman modal	1. Promosi daerah di dalam menarik investasi daerah masih kurang; 2. Kurangnya kompetensi petugas layanan; 3. Kurangnya Ketersediaan sarana dan prasarana.
8	Pelaksanaan Reformasi birokrasi yang belum optimal	1. Tata kelola Pemerintahan belum berjalan dengan baik	1. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang masih relatif besar, berpengaruh pada efisiensi

			dan efektifitas penganggaran; 2. Masih adanya PD belum memahami secara baik tugas dan fungsinya; 3. Partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam pembangunan masih rendah; 4. Belum adanya instrument pengendalian dan pengukuran keberhasilan kebijakan.
9	Tata kelola keuangan daerah yang belum akuntabel	1. Belum optimalnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan Aset daerah	1. Belum terintegrasi secara baik model e-Planning dan e- Budgeting; 2. Kurangnya pengelolaan barang milik daerah ; 3. Adanya keterbatasan SDM yang memiliki pengetahuan yang memadai dalam penerapan akuntansi pemerintahan.
		2. Masih adanya potensi pendapatan pajak yang tidak tercapai.	1. Masih adanya objek pajak yang belum bayar pajak.
10	Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1. Masih kurangnya pemasaran produk dan komoditi unggulan	1. Masih perlunya upaya promosi usaha perdagangan; 2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pasar; 3. Kurangnya inovasi produk yang dihasilkan; 4. Perlunya perluasan pangsa pasar;
		2. Masih rendahnya penerapan Standarisasi dan Perlindungan konsumen	1. Perlunya pelatihan IKM; 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pedagang terhadap tertib niaga; 3. Kurangnya penyelenggaraan pasar murah.
11	Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1. Masih kurangnya pengembangan dan pembinaan IKM	1. Minimnya pembinaan kelompok pengrajin/pelaku industri 2. Kurangnya sarana dan prasarana industri 3. Terbatasnya diversifikasi produk 4. Belum tersedianya sarana informasi IKM

12	Belum optimalnya kontribusi PDRB dari sektor Pertanian	1. Rendahnya nilai tambah Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Menurunnya luas fungsional lahan akibat adanya alih fungsi lahan; 2. Terbatasnya Kualitas SDM Pertanian 3. Masih rendahnya daya saing produk pertanian 4. Penyediaan benih dan pupuk belum memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga); 5. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian 6. Penerapan teknologi pertanian belum optimal 7. Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) akibat adanya Anomali Iklim;
		2. Belum Optimalnya Kapasitas kelembagaan petani	1. Masih perlunya penguatan kelembagaan petani; 2. Kurangnya petugas teknis pertanian/perkebunan.
13	Belum Optimalnya produksi perikanan	1. Masih rendahnya Produksi Perikanan Tangkap	1. Belum terpenuhi sarana usaha perikanan tangkap; 2. sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan yang belum memadai; 3. Jumlah angka konsumsi ikan yang masih rendah; 4. Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat nelayan masih kurang; 5. Armada kapal penangkap ikan masih didominasi oleh kapal penangkap skala kecil; 6. Terbatasnya modal dan bantuan peralatan perikanan pada nelayan.
		1. Masih rendahnya Produksi Perikanan Budidaya	1. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi budidaya ikan 2. Keterbatasan infrastruktur 3. Kurangnya penanganan penyakit
14	Belum optimalnya Peningkatan Nilai Investasi	1. Masih kurangnya pelayanan perizinan terkait penanaman modal	1. Promosi daerah di dalam menarik investasi daerah masih kurang; 2. Kurangnya kompetensi petugas layanan;

			3. Kurangnya Ketersediaan sarana dan prasarana.
15	Belum optimalnya pelayanan sosial pada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS	1. Masih Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani; 2. Validitas DTKS yang masih belum optimal; 3. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah kerawanan sosial masih kurang; 4. Jumlah keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I masih sangat besar; 5. Banyaknya Jumlah Lansia yang tidak tertangani; 6. Adanya pola hidup Komunitas Adat Terpencil (KAT) sulit diselesaikan karena faktor budaya masyarakat suku terasing yang masih sulit diubah; 7. Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) semakin meningkat; 8. Terbatasnya jumlah tenaga pendamping PKH.

Sumber Data : RPD Kabupaten Parigi Moutong

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Sehingga LKjIP Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 merupakan pengukuran tahun pertama dari RPD Kabupaten Parigi Moutong.

RPD Kabupaten Parigi Moutong 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis berlaku 3 (tiga) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Daerah. RPD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

2.2 Visi dan Misi Kabupaten Parigi Moutong

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2005-2025 memuat Visi Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong adalah **“KABUPATEN PARIGI MOUTONG YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**. Dalam mewujudkan visi tersebut terdapat 7 (tujuh) misi yang termuat dalam RPD Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan bijaksana.
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal.
4. Mewujudkan pertanian modern dan produktif.
5. Mengembangkan diversifikasi usaha masyarakat berbasis keterampilan sumber daya manusia.
6. Mewujudkan kemampuan memasarkan produk yang dihasilkan daerah.
7. Mewujudkan tata ruang yang teratur, lingkungan hidup yang seimbang, terpelihara, asri, aman dan tertib.

Misi diatas menjadi pedoman dalam pembangunan daerah, namun setelah dilakukan penelaahan mendalam, ada beberapa misi yang bisa dikonsolidasikan karena memiliki arti yang hampir sama. Hal ini dapat kita lihat di misi ke 2 (dua) dan misi 5 (lima) di konsolidasi ke misi 3 (tiga) dan misi ke 6 (enam) dapat di konsolidasi di misi ke 3 (tiga) dan di misi 4 (empat). Tujuh misi yang telah dikonsolidasi menjadikan 4 (empat) misi yang dikelompokkan seperti yang termuat di bawah ini:

Misi 1 “Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan, Adil dan Bijaksana”

Misi pertama Tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel menggambarkan tujuan Reformasi Birokrasi pembenahan praktik Birokrasi secara komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menciptakan Birokrasi pemerintah yang lebih efektif dan efisien terhadap aspek organisasi, SDM, prosedur dan peraturan, serta pembenahan pada aspek pengawasan dan akuntabilitas untuk dapat

memberikan nilai tambah terhadap kualitas pelayanan publik. Menata ulang, menyempurnakan dan memperbaiki birokrasi agar menjadi lebih bersih, efisien, efektif dan produktif. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut ada tiga sasaran yang harus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong yaitu indeks reformasi birokrasi dan kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil dan akuntabel serta kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien ditunjukkan untuk birokrasi pengelolaan keuangan daerah.

Misi 2 “Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Handal”

Misi ke dua meningkatkan kualitas Manusia yang Berdaya Saing, menggambarkan daya saing sangat dipengaruhi oleh kualitas manusia yang ada. Diharapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan mampu meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Parigi Moutong di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini dijabarkan ke dalam dua sasaran terkait pendidikan dan kesehatan yaitu kualitas pengelolaan pendidikan yang berdaya saing dan kualitas kesehatan yang berdaya saing.

Misi 3 “Mewujudkan Pertanian Modern dan Produktif”

Misi ke tiga meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, menggambarkan Kabupaten Parigi Moutong dengan hasil yang melimpah di sektor pertanian dan perikanan untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi harus meningkatkan nilai tambah produk di sektor pertanian dan perikanan. sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang konsumtif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Misi 4 “Mewujudkan Tata Ruang yang Teratur, Lingkungan Hidup yang Seimbang, Terpelihara, Asri, Aman dan Tertib”

Misi ke empat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya kualitas perairan, udara, dan tutupan lahan serta meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dengan sasaran

menurunnya resiko bencana. Untuk mengukur tercapainya tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan LKjIP Kabupaten Parigi Moutong 2024 adalah untuk mempertegas serta mendapatkan komitmen penuh tentang visi-misi pembangunan daerah, selanjutnya juga bertujuan memberikan arah pemamfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki kabupaten parigi moutong secara optimal.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

VISI	Misi	Tujuan	Sasaran
Kabupaten Parigi Moutong yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan bijaksana.	Tata kelola birokrasi yang, efektif, efisien, dan akuntabel	1. Kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil dan akuntabel 2. Kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien
	2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang handal	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	1. Kualitas pengelolaan pendidikan yang berdaya saing 2. Kualitas kesehatan yang berdaya saing 3. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin

	3. Mewujudkan pertanian modern dan produktif.	Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.	1. Meningkatnya produksi pertanian 2. Meningkatnya produksi perikanan 3. Meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan 4. Meningkatnya investasi daerah
	4. Mewujudkan tata ruang yang teratur, lingkungan hidup yang seimbang, terpelihara, asri, aman dan tertib	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	1. Meningkatnya kualitas perairan, udara dan tutupan lahan 2. Menurunnya risiko bencana 1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Pemanfaatan ruang

Sumber Data : RPD Kabupaten Parigi Moutong

2.4. Indikator Kinerja utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran II.

2.5. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk

menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 mengacu pada dokumen RPD Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

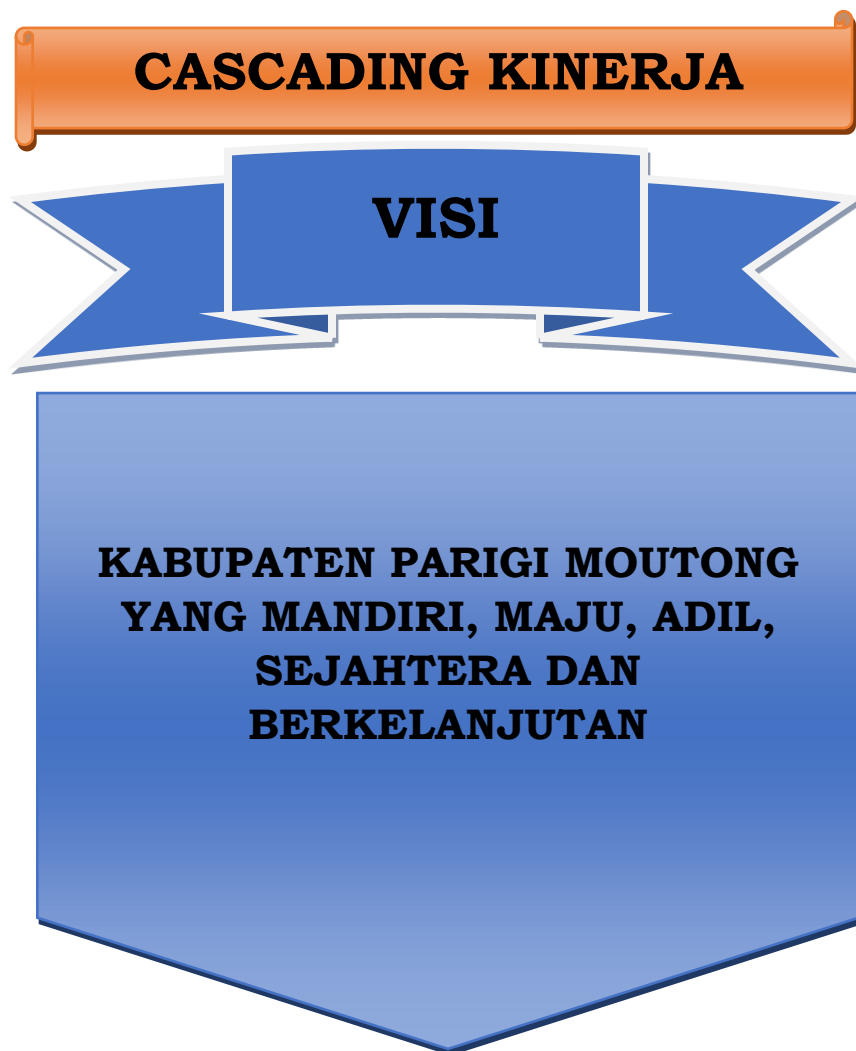
2.6. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya). Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Kabupaten Parigi Moutong dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen organisasi serta bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi baik perubahan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dalam perjanjian kinerjanya menetapkan indikator sasaran program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan anggaran Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran I.

2.7 Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Parigi Moutong menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Parigi Moutong, adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Visi Kabupaten Parigi Moutong



Mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan bijaksana.

Mewujudkan sumberdaya manusia yang handal

Mewujudkan pertanian modern dan produktif.

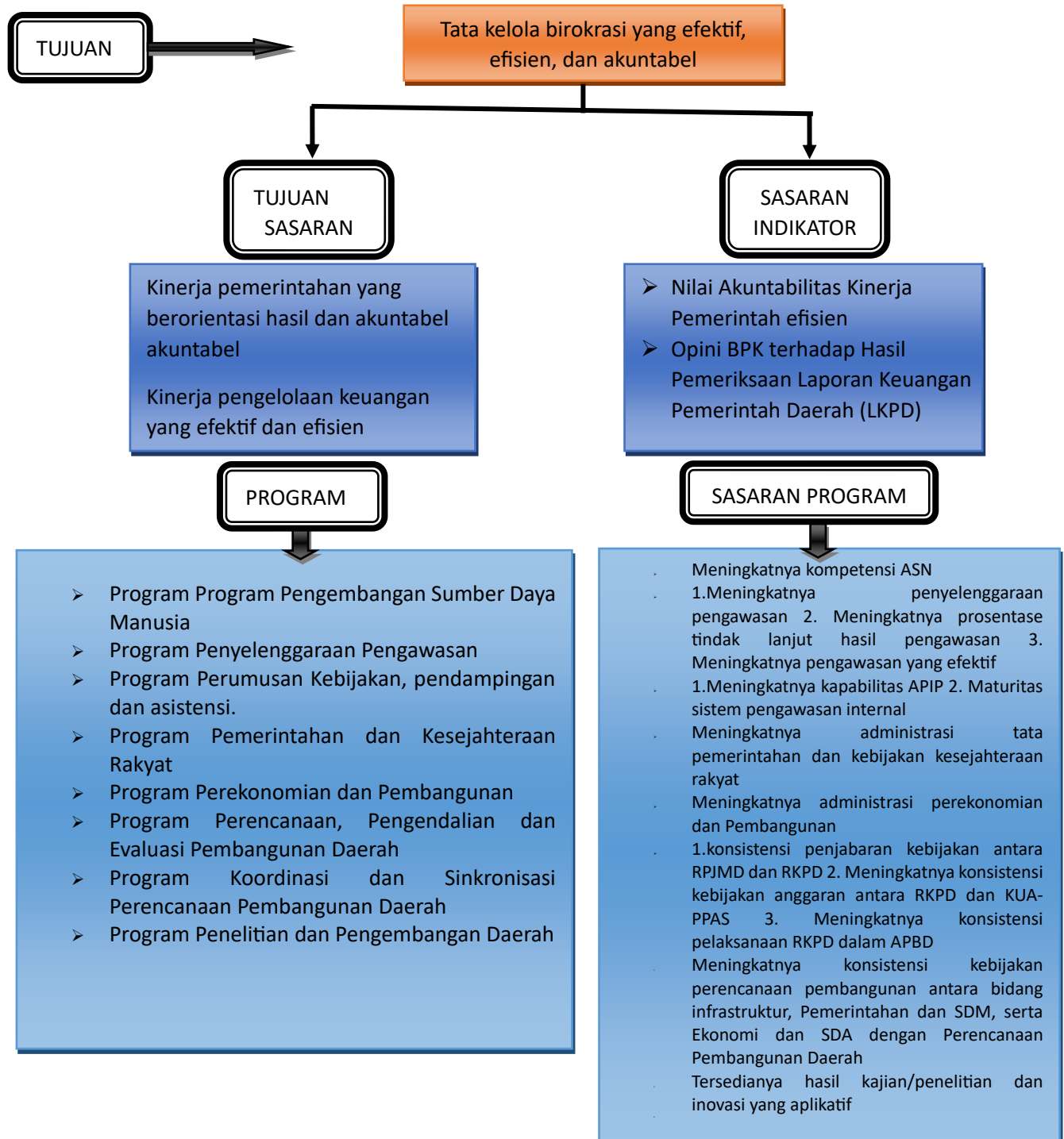
Mewujudkan tata ruang yang teratur, lingkungan hidup yang
seimbang, terpelihar, asri, aman dan tertib

KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2024- 2026

Gambar 2.2 Misi Kabupaten Parigi Moutong

MISI I :

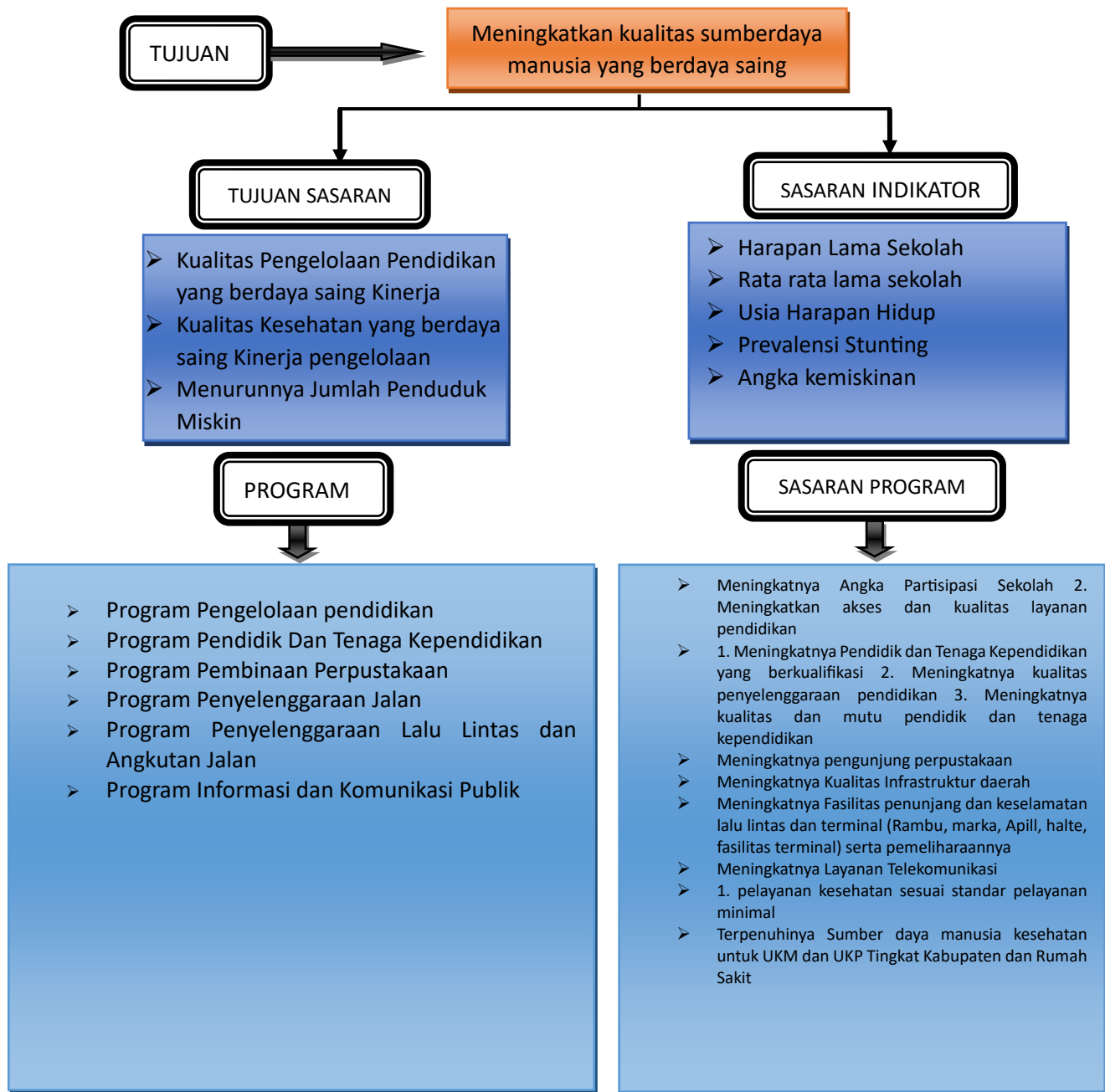
“Mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan bijaksana”



Gambar 2.3 Cascading Misi I

MISI II :

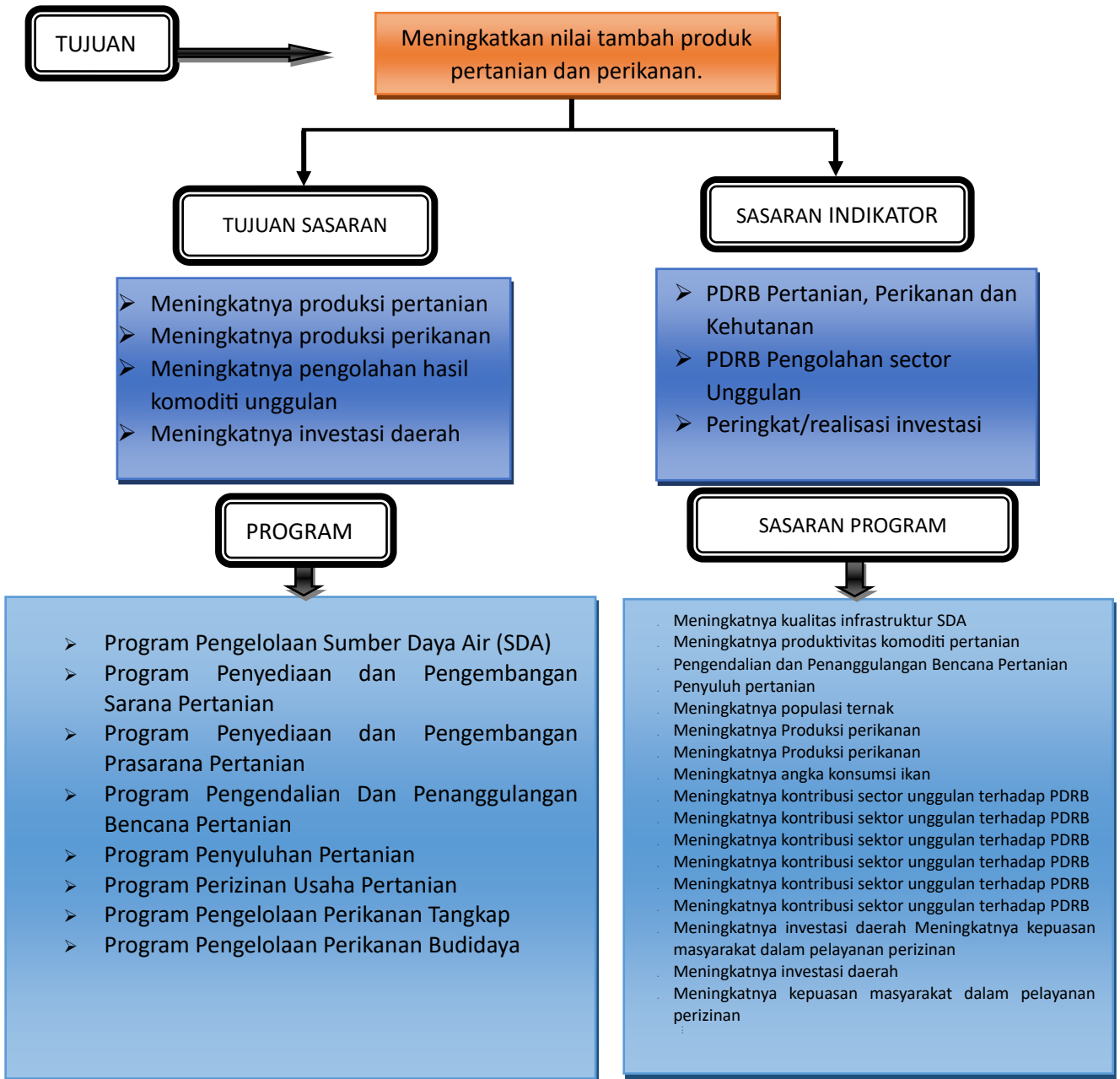
“Mewujudkan sumberdaya manusia yang handal”



Gambar 2.4 Cascading Misi II

MISI III :

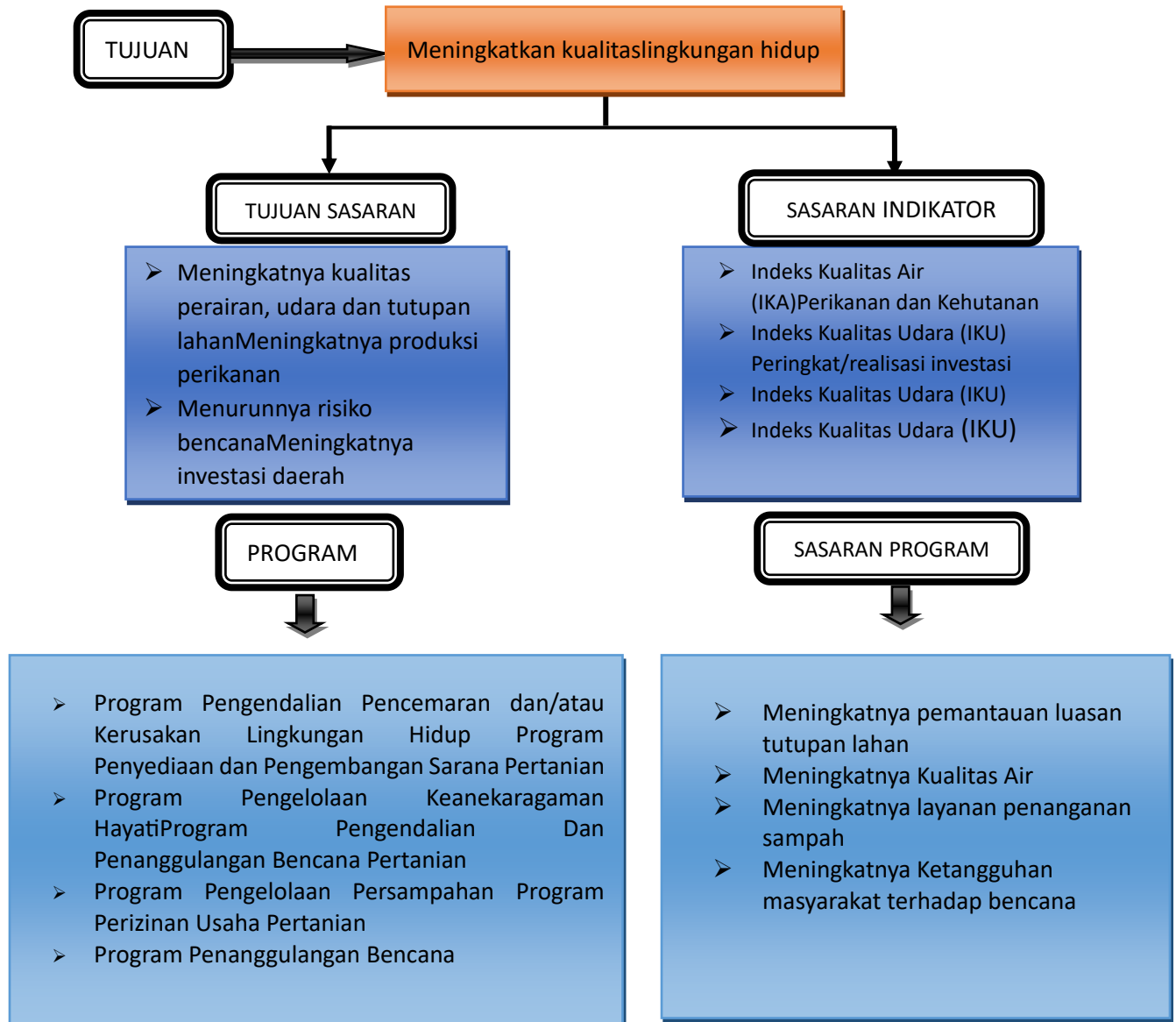
“Mewujudkan pertanian modern dan produktif”



Gambar 2.5 Cascading Misi III

MISI IV :

“Mewujudkan tata ruang yang teratur, lingkungan hidup yang seimbang, terpelihara, asri, aman dan tertib”



Gambar 2.6 Cascading Misi IV

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Untuk mempermudah kategori atas capaian indikator kinerja sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna/kategori dari nilai sebagai berikut:

1. Rumus 1, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \dots$$

2. Rumus 2, apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% = \dots$$

Sedangkan pemberian kategori pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 3.1
Kerangka Pengukuran Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	Skala Nilai	Keterangan	
1.	>100%	Lebih dari seratus persen	Sangat Berhasil (SB)
2.	75% s.d <100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil (B)
3.	55% s.d <75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil (CB)

4.	<55%	Kurang dari lima puluh lima persen	Kurang Berhasil (KB)
----	------	------------------------------------	-------------------------------

Sumber Data : Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menentukan ukuran keberhasilan kinerjanya mengacu pada sasaran strategis yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Meskipun belum terdapat penetapan kinerja yang disusun dalam peraturan atau keputusan Bupati Parigi Moutong, namun Indikator sasaran strategis tersebut selanjutnya ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang dibuat setiap tahun agar pencapaian sasaran strategis untuk mendukung visi dan misi yang termuat dalam RPD dapat dilaksanakan secara maksimal. Berikut merupakan pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam RPD sesuai misi yang telah ditetapkan:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	REALIS ASI 2023	REALIS ASI 2024	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	43	44,07	62,1	SB (144)
2	Meningkatnya kinerja pemerintah yang berorientasi hasil dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	72,00	64,39	65,27	B (90,6)
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP	WTP	WDP	N/A
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,09	67,11	67,49	B (99,1)
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan yang berdaya saing	Harapan lama sekolah	Tahun	12,54	12,51	12,52	B (99,8)
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,87	8,04	8,05	SB (102,2)
6	Meningkatnya kualitas Kesehatan yang berdaya saing	Usia harapan hidup	Tahun	65	67,09	68,72	SB (105,7)

		Prevelensi Stunting	Persen	23,35	10	8,7	SB (172,7)
7	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	Persen	14,28	14,91	14,20	SB (100,5)
8	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian dan perikanan	Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	Persen	4,88	3,71	3,50	CB (71,7)
9	Meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan kehutanan	PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Berlaku Rp. (juta)	9.456.366	8.497.940	9.178.140	B (97)
			Konstanta Rp. (juta)	5.747.094	5.308.300	5.425.780	B (94,4)
10	Meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan	PDRB Pengolahan	Berlaku Rp. (juta)	520.256	482.710	498.200	B (95,7)
			Konstanta Rp. (juta)	302.453	284.050	291.700	B (96,4)
11	Meningkatnya investasi daerah	Peringkat/realisasi investasi	Milyar	186,352,848,144	4.478.464.456.079	4.450.082.464.263	SB (100)
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	79,55	74,84	72,81	B (91,5)
13	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	65,50	52,86	50,00	B (76,9)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	94,76	96,99	94,61	SB (100,1)
		Indeks tutupan lahan	Poin	78,69	71,63	71,68	B (91)
14	Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin	108,39	97,72	93,53	SB (113,7)
15	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	80	85,87	80	B (100)
16	Meningkatkan ruang terbuka hijau	Luasan RTH publik sebesar 20% dari wilayah kota/Kawasan perkotaan	Persen	18,5	41,49	41,49	SB (224)

Sumber Data : LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dan BPS Parigi Moutong Tahun 2024

Berikut ini kami jabarkan target dan capaian sasaran, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, faktor penyebab kegagalan/keberhasilan capaian sasaran, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan program/kegiatan yang menunjang tercapainya target sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil dan bijaksana.

Tabel 3.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Pertama

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	43	44,07	62,1
2	Meningkatnya kinerja pemerintah yang berorientasi hasil dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	72,00	64,39	65,27
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP	WTP	WDP

Sumber Data : Hasil Evaluasi MENPAN RB 2024 & Hasil Evaluasi BPK RI 2024

Tabel 3.4
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP 2024	
		NILAI	KATEGORI
1	Banggai	75,74	BB
2	Banggai Kepulauan	60,82	B
3	Banggai Laut	60,04	B
4	Buol	60,01	B
5	Donggala	57,60	CC
6	Morowali	60,68	B
7	Morowali Utara	60,13	B
8	Parigi Moutong	65,27	B
9	Poso	64,55	B
10	Sigi	68,79	B
11	Tojo Una-Una	61,67	B

12	Tolitoli	63,57	B
13	Palu	66,73	B

Sumber Data : LKjIP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Pada sasaran meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 43 dan realisasi sebesar 62,1. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Indeks RB mengalami kenaikan yang sangat signifikan yang awalnya 44,07 poin naik menjadi 62,1 poin. Hal tersebut menunjukkan telah tercapainya target RPD 2024-2026, sehingga untuk sasaran meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dapat dikatakan berhasil. Tentunya hal tersebut tercapai dengan adanya dorongan dan upaya pada setiap Perangkat Daerah baik pelaksana RB general dan tematik ataupun penanggung jawab RB general dan tematik. Selain itu keterlibatan pimpinan Instansi dalam upaya mendorong peningkatan nilai RB sangat aktif. Dengan tercapainya target tersebut merupakan awal dari upaya peningkatan RB yang masih perlu. Dalam pelaksanaan peningkatan RB tentunya masih terdapat beberapa kendala seperti masih terdapat indikator general yang masih belum terisi seperti Penyesuaian Sistem Kerja yang dikarenakan belum ditetapkan peraturan bupati tentang sistem kerja, selain itu terdapat pula indikator general Indeks Kualitas Kebijakan yang belum terisi yang dikarenakan belum melakukan pendaftaran akun instansi sehingga tidak mengikuti survei IKK, indikator general Zona Integritas juga belum diterapkan pada Pemerintah Daerah dan indikator general Indeks SPBE belum ada pelaksanaan pada Pemerintah Daerah, sehingga jika indikator tersebut dapat dioptimalkan maka akan menambah penilaian dari RB itu sendiri.

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan nilai SAKIP Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan sasaran kedua pada misi pertama yaitu meningkatnya kinerja pemerintah yang berorientasi hasil dan akuntabel dengan perolehan nilai SAKIP sebesar 65,27 dengan kategori B. Hal tersebut menunjukkan kategori SAKIP baik namun belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPD yaitu sebesar 72, hal tersebut menjadi tantangan untuk pemerintah daerah untuk melakukan upaya peningkatan nilai SAKIP sesuai dengan target RPD. Dalam proses meningkatkan nilai SAKIP, ada beberapa permasalahan yang dialami sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang SAKIP, tidak semua ASN pada Perangkat Daerah memahami pentingnya menyusun dokumen SAKIP. Pemahaman yang kurang dapat menghambat proses penyusunan dan pengimputan dokumen pada e-sakip reviu.
2. Fokus pada proses administrasi, dokumen yang terdapat pada sebagian besar Perangkat Daerah belum menggambarkan kinerja yang ingin dicapai organisasi hanya fokus pada pemenuhan dokumen yang dapat mengugurkan kewajiban dalam penyelesaian permintaan dokumen.
3. Belum optimalnya konsistensi dalam substansi perencanaan dan penganggaran pada setiap program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis sehingga pelaksanaan program dan kegiatan hanya bersifat rutinitas.
4. Belum diterapkan pemberian reward dan punishment sehingga Perangkat Daerah masih menganggap dokumen SAKIP tidak berpengaruh pada kinerja organisasi.

Pada sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien Pemerintah Daerah menargetkan pada tahun 2024 opini WTP, namun dalam pelaksanaannya mendapat opini WDP. Opini yang diberikan oleh BPK adalah hasil dari evaluasi terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, serta menunjukkan seberapa baik Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Opini ini memiliki gambaran yang sangat berpengaruh terhadap kredibilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP hal tersebut menggambarkan pada tahun anggaran 2024, pada aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran Pemerintah Daerah perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat mencapai target seperti yang terdapat pada RPD. Adapun beberapa permasalahan yang mengakibatkan target sasaran tidak tercapai antara lain:

1. Masih terdapat Perangkat Daerah yang tidak dapat menunjukkan atau mengelola aset daerah secara jelas dan akurat. Misalnya, aset tanah,

gedung, atau kendaraan dinas tidak tercatat dengan baik atau tidak dilaporkan secara lengkap.

2. Pengawasan dan pengendalian internal yang lemah sering menyebabkan terjadinya penyalahgunaan anggaran, pemborosan, dan bahkan potensi korupsi. Tanpa sistem pengendalian yang baik, pengelolaan keuangan daerah menjadi rentan terhadap manipulasi atau penyimpangan.
3. Perangkat Daerah yang tidak segera menindaklanjuti temuan-temuan dari audit sebelumnya atau tidak memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam sistem pengelolaan keuangan.
4. Belum tertibnya dalam administrasi keuangan, seperti pencatatan yang tidak sesuai atau tidak tepat waktu, pengelolaan dana yang tidak sesuai prosedur, atau ketidakakuratan dalam penghitungan anggaran.
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah masih rendah, sehingga masih terdapat ASN yang terjerat masalah hukum serta terdapat temuan BPK terkait kelebihan pembayaran pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan penjelasan dari ketiga sasaran yang menunjang misi pertama, dapat disimpulkan bahwa terdapat satu sasaran yang mencapai target dan dua sasaran yang belum mencapai target. Tentunya hal tersebut menjadikan pendorong Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih maksimal lagi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun strategi dan solusi yang akan dilakukan dalam memaksimalkan kinerja yaitu:

1. Pada sasaran pertama, melakukan penyusunan rencana aksi RB dengan target minimal baik, memperbaiki kualitas rencana aksi baik dari segi pelaksanaan kegiatan ataupun penganggaran. Memaksimalkan indikator RB general yang masih belum terisi dengan melaksanakan kegiatan general pada setiap Perangkat Daerah. Melakukan perbaikan pada setiap indikator general sesuai dengan LHE RB KemenpanRB.
2. Pada sasaran kedua, melakukan pembagian tanggungjawab dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Melaksanakan perbaikan pada keempat aspek sesuai dengan hasil

LHE SAKIP KemenpanRB. Melakukan upaya perbaikan dokumen, khususnya pada dokumen perencanaan yang merupakan langka awal pada pelaksanaan SAKIP Pemerintah Daerah.

3. Pada sasaran ketiga, mendorong upaya penguatan pada pengendalian dan pengawasan internal yang di dukung oleh anggaran yang memadai. Mendorong Perangkat Daerah melakukan tindak lanjut secara cepat dan tepat terhadap temuan-temuan yang dihasilkan oleh BPK dalam audit keuangan serta semua temuan harus diperbaiki dan diselesaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Strategi dan solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja guna pencapaian misi pertama dapat terarah dan optimal yaitu:

- 1) Menggaungkan prinsip dan keyakinan dasar bagi berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adafatif dan Kolaboratif sebagai fondasi budaya kerja ASN yang profesional dengan mengeluarkan surat edaran 800.1/014/Bagian Organisasi tentang Nilai-Nilai *Core Value* ASN berAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tanggal 3 Februari tahun 2023 serta pada setiap kegiatan yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah.
- 2) Melakukan kerja sama untuk pengembangan kapasitas setiap ASN dengan Universitas dalam melaksanakan pembuatan regulasi serta dan pelaksanaan pembuatan rencana aksi pada setiap Perangkat Daerah agar pelaksanaan perencanaan sampai ke tahap penganggaran untuk mendukung program dan kegiatan lebih terarah, untuk mendukung sasaran strategis, serta berupaya mendatangkan narasumber langsung dari Kemeterian Dalam Negeri untuk dapat langsung menjelaskan langsung pada setiap ASN yang berada di setiap organisasi perangkat daerah dalam penyusunan kekurangan/kelemahan dalam melakukan pengukuran kinerja pada setiap Perangkat Daerah sebagai bahan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- 3) Membuat Perjanjian Kerja/Kinerja Khusus antara Bupati Parigi Moutong dengan setiap Kepala Perangkat Daerah yang bertujuan untuk melakukan pencegahan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme maupun penyalahgunaan jabatan serta bertanggung jawab pada setiap tindakan penyalahgunaan yang terjadi pada Perangkat Daerahnya agar setiap Kepala Perangkat Daerah lebih melakukan pengawasan internal yang lebih optimal kepada setiap aparatur sipil negara yang dipimpinnya.
- 4) Mendorong pembuatan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pada setiap Perangkat Daerah agar dalam pelaksanaan pengukuran kinerja lebih terarah dan tepat waktu dengan membuat Surat Keputusan Bupati sebagai kerangka acuan bagi setiap Perangkat Daerah.

2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Handal

Tabel 3.5
Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Kedua

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,09	67,11	67,49
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan yang berdaya saing	Harapan lama sekolah	Tahun	12,54	12,51	12,52
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,87	8,04	8,05
3	Meningkatnya kualitas Kesehatan yang berdaya saing	Usia harapan hidup	Tahun	65	67,09	68,72
		Prevelensi Stunting	Persen	23,35	10	8,7
4	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	Persen	14,28	14,91	14,20

Sumber Data : BPS Parigi Moutong Tahun 2024 & LKjIP Dinas Kesehatan 2024

Berdasarkan tabel 3.5, pada sasaran pertama yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Target tahun 2024 sebesar 68,09 poin, sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar

67,49. Hal tersebut menunjukkan belum tercapainya target pada sasaran pertama, jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat 67,11 poin. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian dari tahun sebelumnya. Tentunya perlu dilakukan upaya perbaikan guna meningkatkan poin IPM sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan sasaran pertama ada beberapa permasalahan serta kendala sehingga pada sasaran pertama belum maksimal, adapun permasalahan serta kendala sebagai berikut:

1. Kualitas pendidikan yang masih rendah, meskipun akses pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong semakin terbuka namun kualitas pendidikan yang masih sangat timpang dengan daerah perkotaan.
2. Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Kabupaten Parigi Moutong, dengan sebagian besar penduduk di beberapa wilayah masih hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut data BPS tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong sebesar 14,20%.
3. Masih rendahnya pendapatan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan yang berdaya saing terdapat dua indikator kinerja yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada indikator harapan lama sekolah, target tahun 2024 sebesar 12,54 tahun sedangkan realisasi sebesar 12,52 tahun. Hal tersebut menunjukkan belum tercapainya target RPD, namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat kenaikan. Meskipun pada tahun 2024 ada kenaikan namun jika dibandingkan tahun 2023, hal tersebut tidak begitu signifikan. Pada indikator rata-rata lama sekolah, target tahun 2024

sebesar 7,87 tahun sedangkan realisasi sebesar 8,05 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa target indikator telah tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat kenaikan yang awalnya 8,04 tahun menjadi 8,05 tahun.

Pada sasaran meningkatnya kualitas kesehatan yang berdaya saing terdapat dua indikator kinerja yaitu usia harapan hidup dan prevalensi stunting. Pada indikator kinerja usia harapan hidup menargetkan tahun 2024 sebesar 65 tahun sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 68,72 tahun. Hal tersebut menunjukkan telah tercapainya target kinerja dan dapat dikategorikan berhasil. Sedangkan pada indikator kinerja prevalensi stunting, target 2024 sebesar 23,35 persen dan realisasi sebesar 8,7 persen. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan dalam sasaran meningkatnya kualitas kesehatan yang berdaya saing yang disebabkan kedua indikator kinerja mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran menurunnya jumlah penduduk miskin dengan indikator kinerja angka kemiskinan menunjukkan realisasi tahun 2024 sebesar 14,20 persen dengan target RPD sebesar 14,28 persen. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kemiskinan sesuai target RPD, meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong masih cukup besar. Tentunya kerja sama dari berbagai sektor, baik itu pemerintah, masyarakat dan swasta untuk dapat menurunkan angka kemiskinan. Salah satu penyebab menurunnya angka kemiskinan dikarenakan terbuknya lapangan pekerjaan sektor karyawan pabrik packing house durian, masuknya investasi pada sektor pertanian khususnya pertanian durian yang membuka banyak lapangan pekerjaan.

Berdasarkan tabel sasaran strategis di atas, menunjukkan bahwa kabupaten Parigi Moutong dalam Upaya Peningkatan kesejahteraan Masyarakat dengan pendekatan peningkatan sumber daya manusia, kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang berdaya saing. Dari empat sasaran dan Indikator seluruh capaian yang telah ditetapkan hampir keseluruhan dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, namun pada tingkatan masyarakat masih banyak terdapat persoalan-persoalan yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan dalam Peningkatan taraf hidup yang lebih baik.
2. Sarana dan prasarana fasilitas Pendidikan masih rendah.
3. Presentase (PAUD, SD, SMP, PKBM) ber akreditasi masih rendah.
4. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya kesehatan. Masih terdapatnya beberapa jenis tenaga medis dan kesehatan yang wajib tersedia masih kosong dan belum terisi formasinya.
5. Kesadaran terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik masyarakat maupun aparatur pemerintah masih dibawah target yang diharapkan.
6. Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (Desa ODF) relatif masih di bawah target baik skala regional maupun nasional. Sampai dengan tahun 2024 baru 50,53% desa yang telah mendeklarasikan sebagai desa ODF.

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan strategi dan solusi dalam pemecahan masalah antara lain:

1. Melakukan kerja sama dengan pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat dalam mendorong kesadaran Masyarakat akan pentingnya pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan terutama di daerah desa terpencil.

3. Meningkatkan kualitas manajemen akreditasi sekolah/madrasah.
4. Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan menyusun standar pelayanan.
5. Membudayakan PHBS dan melaksanakan kampanye GERMAS.
6. Meningkatkan upaya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

3. Mewujudkan Pertanian Modern dan Produktif

Tabel 3.6
Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Ketiga

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
1	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian dan perikanan	Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	Persen	4,88	3,71	3,50
2	Meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan kehutanan	PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Berlaku Rp. (juta)	9.456.366	8.497.940	9.178.140
			Konstan Rp. (juta)	5.747.094	5.308.300	5.425.780
3	Meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan	PDRB Pengolahan	Berlaku Rp. (juta)	520.256	482.710	498.200
			Konstan Rp. (juta)	302.453	284.050	291.700
4	Meningkatnya investasi daerah	Peringkat/realisasi investasi	Rp. (mlr)	186,352,848,144	4.478.464.456.079	4.450.082.464.263

Sumber Data : BPS Parigi Moutong Tahun 2024 & LKJIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada sasaran pertama meningkatnya nilai tambah produk pertanian dan perikanan dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Realisasi pada tahun 2024 sebesar 3,50 persen sedangkan target kinerja sebesar 4,88 persen, hal tersebut menunjukkan bahwa pada sasaran tersebut belum mencapai target dan perlu adanya upaya perbaikan untuk dapat meningkatkan LPE Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, LPE tahun 2024 mengalami penurunan yang awalnya pada tahun 2023 sebesar 3,71 persen.

Pada sasaran meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan kehutanan dengan indikator kinerja PDRB pertanian, perikanan dan kehutanan. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 9.178.140 sedangkan target tahun 2024 menurut RPD sebesar Rp. 9.456.366, hal tersebut menunjukkan belum tercapainya target sasaran sehingga perlu dilakukan strategi serta upaya pada Perangkat Daerah terkait guna meningkatkan PDRB pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Selain itu jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 8.497.940, hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023.

Pada sasaran meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan dengan indikator kinerja PDRB pengolahan. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 498.200 sedangkan target tahun 2024 menurut RPD sebesar Rp. 520.256, hal tersebut menunjukkan belum tercapainya target pada sasaran kinerja. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 482.710, pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dalam mencapai target kinerja yang tertuang dalam RPD, tentunya perlu adanya langkah-langkah yang konkrit Pemerintah Daerah selain itu peran Perangkat Daerah sangat diperlukan dalam mewujudkan sasaran kinerja Pemerintah Daerah.

Pada sasaran meningkatnya investasi daerah dengan indikator kinerja realisasi investasi. Target investasi tahun 2024 sebesar Rp. 186,352,848,144 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 4.450.082.464.263. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi investasi sebesar Rp. 4.478.464.456.079, jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi investasi mengalami penurunan yang tidak terlalu banyak. Namun jika dibandingkan dengan target pada RPD, realisasi tahun 2024 sangat jauh melampaui. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan realisasi investasi yang sangat signifikan, tentunya Pemerintah Daerah telah memberikan kepercayaan kepada pihak investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam upaya mendukung Pelaksanaan Misi Ketiga yakni mewujudkan Pertanian yang Modern dan Produktif, dari empat sasaran dan indikator hanya satu sasaran yang pencapaian sangat melampaui target yakni meningkatkan realisasi investasi sementara tiga sasaran yang berhubungan dengan peningkatan produksi pertanian, kelautan dan komoditas unggulan tbelum mencapai target sesuai yang telah di tentukan hal ini terjadi karena berbagai masalah yang di hadapi Pemerintah Daerah kabupaten Parigi Moutong antara lain:

1. Pada indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi yaitu keterbetasan akses pembiayaan pada UMKM, pada umumnya UMKM kesulitan mengakses pembiayaan atau kredit dari perbankan. Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang bergantung pada sektor tertentu, seperti pertanian, perikanan, tanpa melakukan diversifikasi ekonomi.
2. Pada sasaran kinerja meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan kehutanan yaitu penerapan teknologi pertanian belum sepenuhnya di terapkan (pemupukan berimbang, penggunaan benih bermutu dan penerapan sistem tanam), kurangnya sarana produksi dan penanganan pasca panen, masih kurang SDM petani dan penyuluh pertanian, alih fungsi lahan pertanian, masih belum maksimalnya produk olahan hasil perikanan.
3. Pada sasaran meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan, masyarakat belum kreatif dalam mengelola produk unggulan yang ada.

Dari berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan strategi dalam pemecahan masalah antara lain:

1. Efisiensi tenaga kerja dengan menggunakan teknologi pertanian modern.
2. Peningkatan indeks penanaman.
3. Pengamanan produksi dari gangguan OPT.
4. Perbaikan penanganan panen dan pasca panen.
5. Peningkatan nilai jual melalui orientasi kualitas dan pasar.
6. Peningkatan SDM petani dan penyuluh.

4. Mewujudkan Tata Ruang yang Teratur, Lingkungan Hidup yang Seimbang, Terpelihara, Asri, Aman dan Tertib

Tabel 3.7
Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Keempat

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	79,55	74,84	72,81
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	65,50	52,86	50,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	94,76	96,99	94,61
		Indeks tutupan lahan	Poin	78,69	71,63	71,68
3	Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin	108,39	97,72	93,53
4	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	80	85,87	80
5	Meningkatkan ruang terbuka hijau	Luasan RTH publik sebesar 20% dari wilayah kota/Kawasan perkotaan	Persen	18,5	41,49	41,49

Sumber Data : BPS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 & LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Dalam Mewujudkan tata ruang yang teratur, Lingkungan Hidup yang seimbang, terpelihara, asri, aman dan tertib untuk mendukung misi ke Empat, masih banyak Sasaran dan indikator yang tidak tercapai hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan yang dihadapi antara lain:

1. Kurang kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas umum dan masih tingginya perilaku buang sampah bukan pada tempatnya.
2. Masih tingginya tambang-tambang ilegal di Kabupaten Parigi Moutong yang tidak mempertimbangkan dampak aktivitas tambang terhadap lingkungan.

3. Luasnya wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan merupakan salah satu daerah Di Provinsi Sulawesi Tengah yang rawan terhadap bencana sehingga sop mitigasi bencana tidak dapat di terapkan secara maksimal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan upaya antara lain:

1. Melakukan kegiatan yang bertema pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terhadap anak usia dini dengan bekerja sama dengan organisasi kepemudaan.
2. Melibatkan secara langsung ibu rumah tangga dalam melakukan upaya kebersihan lingkungan melalui kegiatan PKK di setiap Desa.
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak APH dan Pemerintah Desa dalam melakukan upaya penertiban tambang ilegal yang beroperasi pada Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
4. Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Bencana pada setiap kecamatan pada wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

3.3 Capaian Indikator Program dan Kegiatan Pemerintah

Faktor lainnya yang berpengaruh dalam pengukuran capaian kinerja berupa penyajian data kinerja yang masih sulit untuk diperoleh dari PD terkait. Hal ini mempengaruhi dalam menilai ada tidaknya peningkatan kinerja. Dengan demikian penyajian terhadap capaian kinerja yang dapat dilaporkan baru sampai pada pencapaian output kegiatan baik berupa barang maupun jasa. Sehingga penyajian capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis belum dapat dilaporkan secara lengkap, Adapun rincian dari daftar pencapaian kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran III.

Berdasarkan prioritas pembangunan diatas, maka kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan dirumuskan ke dalam tujuan, sasaran, indikator sasaran, serta program dan kegiatan. Sampai dengan akhir triwulan IV, seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil evaluasi berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah.

3.4 Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

Pencapaian realisasi anggaran Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan kebijakan daerah. Hal tersebut dikarenakan memiliki peran penting dalam rencana pembangunan dan keberhasilan rencana program kegiatan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, tercapainya realisasi anggaran pemerintah yang tepat waktu dan sesuai target adalah kunci untuk menjaga kelancaran pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adapun rincian dari daftar Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada Lampiran IV.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Parigi Moutong disusun berdasarkan RPD Kabupaten Parigi Moutong. Kabupaten Parigi Moutong telah berupaya memaksimalkan sasaran berdasarkan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 terhadap 16 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja. Apabila diuraikan capaian kinerja tiap indikator kinerja, dapat dihasilkan sebanyak 9 dicapai indikator kinerja dengan capaian Sangat Berhasil, sebanyak 10 indikator kinerja dengan capaian Berhasil dan sebanyak 1 indikator kinerja dengan Cukup capaian Berhasil. Capaian tersebut merupakan gambaran dari kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024. Tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong perlu melakukan perbaikan dan upaya peningkatan pada 11 indikator kinerja yang belum masuk kedalam kategori sangat berhasil.

4.2 Tindak Lanjut

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri guna meningkatkan kondisi perekonomian Kabupaten Parigi Moutong.
2. Menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
3. Menyelaraskan penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati dengan RPD yaitu 2024–2026 dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan Renstra dan target kinerja dengan DPA yang sudah ditetapkan.
4. Melaksanakan program-program dan kegiatan yang diprioritaskan pada capaian sasaran yang belum berhasil.
5. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya terutama sektor pariwisata dan perdagangan.

LAMPIRAN I



BUPATI PARIGI MOUTONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RICHARD ARNALDO**

Jabatan : **Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pj. Bupati Parigi Moutong



RICHARD ARNALDO

NO	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2024
1	Kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Nilai	72
2	Kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		Opini	WTP
3	Kualitas Pengelolaan Pendidikan yang berdaya saing	Harapan Lama Sekolah		Tahun	12,54
		Rata rata lama sekolah		Tahun	7,87
4	Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	Usia Harapan Hidup		Tahun	65
		Prevalensi Stunting		Persen	23,35
5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka kemiskinan		Persen	14,28
6	Meningkatnya produksi pertanian, Perikanan dan Kehutanan	PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Berlaku	Rupiah (jutar)	9.456.366
			Konstan	Rupiah (jutar)	5.747.094
7	Meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan	PDRB Pengolahan	Berlaku	Rupiah (juta)	520.256
			Konstan	Rupiah (Juta)	302.453
8	Meningkatnya investasi daerah	Peringkat/realisasi investas		Rupiah	186,352,848,144
9	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)		Poin	65,50
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		Poin	94,76
		Indeks Tutupan Lahan		Poin	78,69
10	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)		Poin	108,39
11	Meningkatnya ruang terbuka hijau	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		Persen	18,5

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	146.815.856.011
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	9.452.274.342
3	Program Pengembangan Kebudayaan	708.633.200
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	579.820.500
5	Program Pembinaan Sejarah	46.000.000
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	343.268.200
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	105.090.324.752
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6,548,998,692
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	338,028,000
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	991,515,988
11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13,760,000,000
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	50,000,000
13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8,450,127,180
14	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3,939,943,953
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11,002,000
16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	6,689,506,481
17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,632,686,086
18	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,589,819,959
19	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1,894,383,793
20	Program Penataan Bangunan Gedung	3,048,027,897
21	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	480,107,760
22	Program Penyelenggaraan Jalan	66,887,351,827
23	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	68,420,400
24	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,010,091,400
25	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	122,720,200
26	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1,000,587,800
27	Program Pengembangan Perumahan	824,028,200
28	Program Kawasan Permukiman	2,797,351,900
29	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1,517,069,100
30	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	15,731,900
31	Program Penanggulangan Bencana	2,068,308,484
32	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	747,094,800
33	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,627,635,100
34	Program Pemberdayaan Sosial	1,697,813,700
35	Program Rehabilitasi Sosial	640,645,274
36	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1,496,171,172
37	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	179,363,321
38	Program Penempatan Tenaga Kerja	56,549,800
39	Program Hubungan Industrial	49,848,737

40	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	30,000,317
41	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	30,000,033
42	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1,469,585,983
43	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	296,239,700
44	Program Perlindungan Perempuan	238,278,900
45	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	263,999,700
46	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	173,794,300
47	Program Pengendalian Penduduk	1,934,049,180
48	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4,469,436,624
49	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2,850,171,400
50	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1,422,542,500
51	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2,110,511,500
52	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1,109,683,000
53	Program Pengawasan Keamanan Pangan	193,636,500
54	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	357,731,100
55	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	366,982,175
56	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	833,023,456
57	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	9,930,800
58	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	21,118,400
59	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	118,595,398
60	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	90,000
61	Program Pengelolaan Persampahan	2,189,194,529
62	Program Pendaftaran Penduduk	588,383,000
63	Program Pencatatan Sipil	72,390,700
64	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	205,455,500
65	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15,750,000
66	Program Penataan Desa	4,608,424,957
67	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1,410,716,000
68	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4,864,454,726
69	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1,027,827,900
70	Program Pengelolaan Pelayaran	150,000,000
71	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1,711,398,900
72	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,368,728,160
73	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	60,047,700
74	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	261,406,050
75	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	180,942,200
76	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	24,711,800
77	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	110,470,500
78	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	179,990,400
79	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	1,035,975,318
80	Program Pengembangan Umkm	1,524,342,536
81	Program Pembinaan Perpustakaan	434,778,100
82	Program Pengelolaan Arsip	150,201,400
83	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8,139,851,810
84	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,362,195,840
85	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	148,844,550
86	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	214,533,700
87	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3,353,095,000
88	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	20,205,100

89	Program Pemasaran Pariwisata	956,955,900
90	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	794,720,000
91	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	20,205,100
92	Program Pemasaran Pariwisata	956,955,900
93	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	794,720,000
94	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3,675,293,350
95	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17,962,594,913
96	Program Penyuluhan Pertanian	2,614,320,525
97	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,964,613,000
98	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,470,241,550
99	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,281,402,500
100	Program Penyuluhan Pertanian	635,550,337
101	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1,005,398,250
102	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,429,159,050
103	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	53,727,500
104	Program Pengembangan Ekspor	401,527,400
105	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	5,539,175,034
106	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	456,514,000
107	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	226,029,300
108	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9,995,069,452
109	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,971,112,100
110	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	14,670,363,850
111	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28,365,842,425
112	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,493,673,550
113	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,651,149,100
114	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	432,854,400
115	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	349,265,278,275
116	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	943,330,900
117	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,047,304,935
118	Program Kepegawaian Daerah	1,704,169,500
119	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	98,138,500
120	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,413,540,225
121	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	727,021,000
122	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	958,801,100
123	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	64,571,976,000
124	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	185,790,000
125	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	150,461,500
126	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	12,819,470,400
127	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	567,868,750
128	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,686,112,087
129	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,254,211,638
130	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	469,463,700

Pj. Bupati Parigi Moutong



RICHARD ARNALDO

LAMPIRAN II

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	43
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,09
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,88
4	Indeks Kualitas Lingkungan hidup	Poin	79,55
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,6
6	Indeks Gini	Nilai	0,28
7	Nilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	72
8	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP
9	Prevalensi Stunting (SSGI)	Persen	23,35
10	Angka Kemiskinan	Persen	14,28
11	Realisasi Investasi	Rupiah	186,352,848,144
12	Indeks Resiko Bencana	Nilai	108,39

LAMPIRAN III

PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 2024

No	Sasaran Dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja (%)	Anggaran	Perangkat daerah Penanggung Jawab
			Rp.	Rp.	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6		7
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) (persen)	146.815.856.011	61.843.973.257	95,30	42,12	DISDIK
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi SPM	9.452.274.342	7.226.781.293	100,00	76,46	DISDIK
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	328.888.711.570	319.741.276.025	96,15	97,22	DISDIK
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE CAKUPAN PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA LOKAL	708.633.200	673.977.891	100,00	95,11	DISDIK
2	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase kesenian daerah yang dikembangkan	579.820.500	558.114.261	100,00	96,26	DISDIK
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase cakupan adat budaya yang dilestarikan	46.000.000	43.550.000	100,00	94,67	DISDIK
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di Lestarkan	343.268.200	325.808.168	100,00	94,91	DISDIK
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan	105.090.324.752	57.408.175.453	49,67	54,63	DINAS KESEHATAN
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat kabupaten	6,548,998,692	6,031,285,067	87.50	92.09	DINAS KESEHATAN

3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penerbitan rekomendasi sarana farmasi , alat kesehatan, P- IRT dan sertifikat uji sesuai standar	338,028,000	313,813,500	119.05	92.84	DINAS KESEHATAN
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan	991,515,988	708,452,071	75.00	71.45	DINAS KESEHATAN
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	74,990,765,519	68,958,484,086	140.24	91.96	DINAS KESEHATAN
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan	13,760,000,000	12,279,504,555	100.00	89.24	BLUD-RSUD ANUNTALOKO
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat kabupaten	50,000,000	49,868,000	100.00	99.74	BLUD-RSUD ANUNTALOKO
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	107,179,371,895	102,937,579,728	100.00	96.04	BLUD-RSUD ANUNTALOKO
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan	8,450,127,180	4,951,165,544	66.67	58.59	RSUD RJTT
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat kabupaten	-	-			RSUD RJTT
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	21,775,341,289	18,570,882,026	75.00	85.28	RSUD RJTT
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan	3,939,943,953	3,595,734,290	97.78	91.26	RSUD BULUYE NAPOA"E MOUTONG
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat kabupaten	11,002,000	8,311,800	50.00	75.55	RSUD BULUYE

							NAPOA"E MOUTONG
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	9,324,052,025	5,811,983,702	87.64	62.33	RSUD BULUYE NAPOA"E MOUTONG
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	6,689,506,481	6,186,533,724	37.00	92.48	DINAS PUPRP
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	1,632,686,086	1,488,125,127	75.00	91.15	DINAS PUPRP
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah tangga berSanitasi	1,589,819,959	1,588,353,641	100.00	99.91	DINAS PUPRP
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		1,894,383,793	1,893,087,993	100.00	99.93	DINAS PUPRP
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Perentase Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (%)	3,048,027,897	3,037,659,161	100.00	99.66	DINAS PUPRP
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Panjang Jalan lingkungan yang dibangun (M)	480,107,760	479,644,860	100.00	99.90	DINAS PUPRP
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	66,887,351,827	64,262,799,801	62.75	96.08	DINAS PUPRP
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	umlah Peserta Pengembangan Jasa Konstruks	68,420,400	67,727,200	-	98.99	DINAS PUPRP
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	1,010,091,400	1,004,826,815	100.00	99.48	DINAS PUPRP
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	18,013,806,621	17,817,858,313	100.00	98.91	DINAS PUPRP
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		122,720,200	122,667,000	100.00	99.96	DINAS PUPRP
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		1,000,587,800	896,321,000	100.00	89.58	DINAS PUPRP

9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	824,028,200	822,517,200	100.00	99.82	DINAS PKP
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman layak Huni	2,797,351,900	2,873,507,154	33.33	102.72	DINAS PKP
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	1,517,069,100	1,516,728,689	-	99.98	DINAS PKP
4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	15,731,900	15,731,900	-	100.00	DINAS PKP
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	4,501,213,854	4,398,254,715	73.00	97.71	DINAS PKP
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		2,068,308,484	1,960,358,380	102.78	94.78	BPBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,915,603,345	3,896,866,107	94.12	99.52	BPBD
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran K3	747,094,800	721,451,892	83.33	96.57	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1,627,635,100	1,604,494,500	100.00	98.58	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	10,449,841,023	10,396,682,128	94.78	99.49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						

1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat KAT dan lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	1,697,813,700	1,696,870,952	100.00	99.94	DINAS SOSIAL
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan	640,645,274	610,016,692	100.00	95.22	DINAS SOSIAL
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial.	1,496,171,172	1,489,508,748	100.00	99.55	DINAS SOSIAL
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	-	-			DINAS SOSIAL
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	-	-			DINAS SOSIAL
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	4,905,711,441	4,843,965,996	96.88	98.74	DINAS SOSIAL
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		-	-		NAKERTRANS
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kopetensi	179,363,321	174,697,883	7.22	97.40	NAKERTRANS
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	56,549,800	49,183,590	44.44	86.97	NAKERTRANS
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Penyelesaian Kasus	49,848,737	47,128,051	71.43	94.54	NAKERTRANS
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	3,262,783,590	3,234,389,630	109.44	99.13	NAKERTRANS
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
1	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi	30,000,317	14,123,537	80.00	47.08	NAKERTRANS
2	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	30,000,033	25,304,440	100.00	84.35	NAKERTRANS
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terbinanya warga Trans	1,469,585,983	1,454,914,461	100.00	99.00	NAKERTRANS
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	296,239,700	295,924,500	100.00	99.89	DP3A2KB

2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait	238,278,900	238,220,256	100.00	99.98	DP3A2KB
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender	263,999,700	263,403,700	100.00	99.77	DP3A2KB
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Indeks Pemberdayaan Gender	-	-			DP3A2KB
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	173,794,300	173,550,700	100.00	99.86	DP3A2KB
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan Anak dan Perempuan yang terlayani	-	-			DP3A2KB
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	6,413,443,059	6,380,949,940	96.67	99.49	DP3A2KB
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		1,934,049,180	1,885,626,828	66.67	97.50	DP3A2KB
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		4,469,436,624	4,424,380,004	100.00	98.99	DP3A2KB
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		2,850,171,400	2,762,988,100	100.00	96.94	DP3A2KB
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	1,422,542,500	1,422,541,800	1,066.67	100.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	2,110,511,500	2,110,164,436	153.89	99.98	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	1,109,683,000	1,109,583,000	100.00	99.99	DINAS KETAHANAN PANGAN
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar dalam Status Aman Pangan	193,636,500	193,636,500	100.00	100.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	3,571,508,935	3,540,049,820	174.08	99.12	DINAS KETAHANAN PANGAN
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						

1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	umlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	357,731,100	352,028,920	100.00	98.41	DLH
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	366,982,175	361,410,348	100.00	98.48	DLH
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Tutupan Lahan	833,023,456	819,442,323	3.04	98.37	DLH
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Badan Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang taat	9,930,800	9,916,835	40.00	99.86	DLH
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Dokumen Permohonan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	21,118,400	20,765,900	130.00	98.33	DLH
6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah Dokumen MHA	-	-			DLH
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Lembaga / Kelompok Peduli Lingkungan Hidup	-	-	-		DLH
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Adiwiyata	118,595,398	114,582,458	133.33	96.62	DLH
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	90,000	90,000	6.67	100.00	DLH
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani	2,189,194,529	2,142,988,971	85.76	97.89	DLH
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	5,609,184,085	5,581,056,419	99.21	99.50	DLH
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang telah mealakukan Pendaftaran	588,383,000	579,218,946	5.88	98.44	DUKCAPIL
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil	72,390,700	71,506,100	-	98.78	DUKCAPIL
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	205,455,500	202,014,873	30.31	98.33	DUKCAPIL
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan	15,750,000	15,750,000	66.67	100.00	DUKCAPIL

5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	5,074,780,011	4,933,140,026	79.61	97.21	DUKCAPIL
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		-	-			
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	4,608,424,957	4,576,002,495	66.67	99.30	DINAS PMD
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Badan Kerja sama antar Desa yang Terbentuk	1,410,716,000	1,409,697,996	100.00	99.93	DINAS PMD
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa berstatus Maju	4,864,454,726	4,727,586,695	94.50	97.19	DINAS PMD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (PKK dan Posyandu) aktif					DINAS PMD
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase terselenggaranya pelayanan lalu lintas dan angkutan yg optimal	1,027,827,900	1,018,153,445	69.56	99.06	DISHUB
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pelabuhan Lokal dan penyeberangan yang dibangun/dipelihara dan dikendalikan/diawasi	150,000,000	149,843,191	100.00	99.90	DISHUB
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	8,018,882,240	7,871,040,127	72.88	98.16	DISHUB
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	1,711,398,900	1,681,045,300	75.00	98.23	DISKOMINFO
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang menyediakan layanan public secara online	1,368,728,160	1,352,291,360	100.00	98.80	DISKOMINFO
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	4,092,925,887	3,801,623,336	95.45	92.88	DISKOMINFO
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah dalam memenuhi data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)	60,047,700	59,643,900	100.00	99.33	DISKOMINFO
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat kematangan tata kelola keamanan sistem informasi pada Perangkat Daerah	261,406,050	259,980,500	100.00	99.45	DISKOMINFO

25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		-	-			
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Fasilitasi Penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	180,942,200	179,813,900	100.00	99.38	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten/ kota	24,711,800	22,104,000	100.00	89.45	DINAS KOPERASI DAN UKM
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk koperasi yang wilayah keanggotannya dalam kabupaten/kota	110,470,500	102,491,800	100.00	92.78	DINAS KOPERASI DAN UKM
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten kota	179,990,400	179,393,680	100.00	99.67	DINAS KOPERASI DAN UKM
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	1,035,975,318	975,115,718	100.00	94.13	DINAS KOPERASI DAN UKM
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	1,524,342,536	1,519,328,786	100.00	99.67	DINAS KOPERASI DAN UKM
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	4,309,155,125	4,218,848,076	75.63	97.90	DINAS KOPERASI DAN UKM
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan yang dibina	434,778,100	406,026,306	100.00	93.39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	5,251,490,599	5,183,000,718	100.00	98.70	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Arsip yang dikelola	150,201,400	146,768,720	100.00	97.71	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang berhasil diselamatkan dan dilindungi					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	8,139,851,810	8,043,585,873	132.00	98.82	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	1,362,195,840	1,345,129,450	245.00	98.75	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Angka Konsumsi Ikan	148,844,550	148,702,404	100.00	99.90	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Pemebuhan Administrasi dan BMD Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	4,448,679,341	4,406,958,279	95.33	99.06	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang aktif sebagai kader Anti kenakalan Remaja	214,533,700	214,081,400	100.00	99.79	DISPORAPAR
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	3,353,095,000	3,341,883,750	100.00	99.67	DISPORAPAR
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		-	-			DISPORAPAR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dn BMD Penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,246,591,920	1,239,770,870	96.67	99.45	DISPORAPAR
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek wisata yang tertata	20,205,100	17,991,700	75.00	89.05	DISPORAPAR
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	jumlah promosi dan pemasaran objek wisata (lokasi)	956,955,900	951,925,380	100.00	99.47	DISPORAPAR
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	-	-			DISPORAPAR
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan SDM yang terampil	794,720,000	790,436,700	100.00	99.46	DISPORAPAR

5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD Penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	3,256,342,779	3,238,277,705	100.00	99.45	DISPORAPAR
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek wisata yang tertata	20,205,100	17,991,700	75.00	89.05	DISPORAPAR
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	jumlah promosi dan pemasaran objek wisata (lokasi)	956,955,900	951,925,380	100.00	99.47	DISPORAPAR
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	-	-			DISPORAPAR
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan SDM yang terampil	794,720,000	790,436,700	100.00	99.46	DISPORAPAR
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD Penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	3,256,342,779	3,238,277,705	100.00	99.45	DISPORAPAR
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Sarana Pertanian Dalam Rangka Mendukung Produktivitas dan Produksi Pertanian	3,675,293,350	2,838,375,599	88.89	77.23	DINAS TPHP
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Jumlah PraSarana Pertanian Dalam Rangka Mendukung Efisiensi Biaya Produksi dan Produktivitas	17,962,594,913	16,218,914,598	81.83	90.29	DINAS TPHP
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Jumlah Bencana Pertanian Yang di Kendalikan	-	-			DINAS TPHP
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	2,614,320,525	2,460,508,230	95.00	94.12	DINAS TPHP
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	16,989,976,971	16,402,771,609	95.54	96.54	DINAS TPHP
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kontribusi sektor unggulan pertanian terhadap PDRB	1,964,613,000	1,887,474,478	66.78	96.07	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kontribusi sektor unggulan pertanian terhadap PDRB	3,470,241,550	3,440,090,367	100.00	99.13	DINAS PETERNAKAN DAN

							KESEHATAN HEWAN
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Status Kesehatan Hewan	1,281,402,500	1,200,658,149	116.40	93.70	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Jumlah Bencana Pertanian Yang di Kendalikan	-	-			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	-	-			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	635,550,337	572,829,092	100.00	90.13	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	6,331,192,322	6,253,188,748	95.84	98.77	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	1,005,398,250	933,503,200	100.00	92.85	DISPERINDAG
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Tertatanya Tempat Berusaha Bagi PKL Dan asongan	1,429,159,050	1,428,306,550	100.00	99.94	DISPERINDAG
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaku Usaha Yang Tertib Niaga	53,727,500	52,991,500	100.00	98.63	DISPERINDAG
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuha Nilai Ekspor Barang/Komoditi	401,527,400	401,061,172	100.00	99.88	DISPERINDAG
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		-	-			DISPERINDAG
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan kecil	5,539,175,034	5,257,863,486	66.67	94.92	DISPERINDAG

7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-	-			DISPERINDAG
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Yang Di Bina	456,514,000	454,636,318	100.00	99.59	DISPERINDAG
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM Yang Di Bina	226,029,300	224,083,600	100.00	99.14	DISPERINDAG
36	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan pemerintah dan kesra yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan	9,995,069,452	9,972,445,195	100.00	99.77	DISPERINDAG
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang ditindak lanjuti pemangku kepentingan	2,971,112,100	2,959,025,510	100.00	99.59	DISPERINDAG
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	53,869,682,265	54,529,221,415	90.15	101.22	DISPERINDAG
37	SEKRETARIAT DPRD						
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	14,670,363,850	14,419,398,267	181.82	98.29	SETWAN
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	28,365,842,425	27,269,293,631	100.00	96.13	SETWAN
38	PERENCANAAN						
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran Arah Kebijakan RPJMD dalam RKPd.	1,493,673,550	1,492,379,638	100.00	99.91	BAPPEDALIT BANGDA
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	2,651,149,100	2,646,054,600	100.00	99.81	BAPPEDALIT BANGDA
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerahBidang Pemerintahan, SDM, Ekonomi dan Infrastruktur	9,101,163,748	9,091,685,575	100.00	99.90	BAPPEDALIT BANGA
39	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		-	-			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Inovasi Daerah	432,854,400	432,319,900	100.00	99.88	BAPPEDALIT BANGDA
40	KEUANGAN						
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	349,265,278,275	346,879,793,472	115.18	99.32	BPKAD
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	943,330,900	886,786,835	100.00	94.01	BPKAD

3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	65,171,903,749	65,059,297,404	68.75	99.83	BPKAD
41	KEUANGAN						
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	3,047,304,935	2,994,594,334	94.39	98.27	BAPENDA
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	10,196,816,462	10,052,759,349	91.64	98.59	BAPENDA
42	KEPEGAWAIAN						
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan layanan kepegawaian	1,704,169,500	1,639,255,172	102.42	96.19	BKPSDM
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	6,011,585,989	5,957,702,687	100.00	99.10	BKPSDM
43	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		-	-			
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesu	98,138,500	97,774,745	100.00	99.63	BKPSDM
44	INSPEKTORAT DAERAH		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	1,413,540,225	1,333,722,141	100.00	94.35	INSPEKTORAT DAERAH
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level maturitas pengawasan internal	727,021,000	725,915,726	100.00	99.85	INSPEKTORAT DAERAH
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	10,760,273,409	10,657,200,372	328.59	99.04	INSPEKTORAT DAERAH
45	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	958,801,100	925,187,100	100.00	96.49	BADAN KESBANGPOL
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	64,571,976,000	64,552,662,200	100.00	99.97	BADAN KESBANGPOL
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	185,790,000	180,656,700	50.00	97.24	BADAN KESBANGPOL
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penguatan rasa nasionalisme	150,461,500	150,353,500	100.00	99.93	BADAN KESBANGPOL

6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	12,819,470,400	12,798,438,396	100.00	99.84	BADAN KESBANGPOL
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	3,953,722,068	3,490,680,655	69.06	88.29	BADAN KESBANGPOL
1	KECAMATAN SAUSU						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	31,855,000	30,580,000		96.00	KECAMATAN SAUSU
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	36,396,500	36,036,500	100.00	99.01	KECAMATAN SAUSU
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	39,210,000	39,210,000	100.00	100.00	KECAMATAN SAUSU
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		7,500,000	7,500,000		100.00	KECAMATAN SAUSU
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	2,209,024,708	2,184,291,348	75.00	98.88	KECAMATAN SAUSU
2	KECAMATAN TORUE						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	11,180,000	11,180,000	100.00	100.00	KECAMATAN TORUE
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	32,106,900	32,093,500	100.00	99.96	KECAMATAN TORUE
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	34,368,800	34,317,000	100.00	99.85	KECAMATAN TORUE
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		47,527,700	47,454,500	100.00	99.85	KECAMATAN TORUE
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,935,320,377	1,936,113,166	92.61	100.04	KECAMATAN TORUE
3	KECAMATAN PARIGI SELATAN		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	-	-			KECAMATAN PARIGI SELATAN
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	33,618,400	31,851,400	200.00	94.74	KECAMATAN PARIGI SELATAN
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	67,248,400	51,532,000	7.67	76.63	KECAMATAN PARIGI SELATAN

4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	-			KECAMATAN PARIGI SELATAN
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,655,568,204	1,642,004,431	146.00	99.18	KECAMATAN PARIGI SELATAN
4	KECAMATAN PARIGI		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	421,533,800	267,672,500	100.00	63.50	KECAMATAN PARIGI
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	1,038,822,587	273,415,950	66.67	26.32	KECAMATAN PARIGI
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	31,555,000	31,555,000	100.00	100.00	KECAMATAN PARIGI
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	-			KECAMATAN PARIGI
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	6,551,605,807	5,695,247,428	50.00	86.93	KECAMATAN PARIGI
5	KECAMATAN AMPIBABO		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	52,974,500	52,969,500	100.00	99.99	KECAMATAN AMPIBABO
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	20,355,900	20,283,700	100.00	99.65	KECAMATAN AMPIBABO
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	75,676,200	75,676,200	100.00	100.00	KECAMATAN AMPIBABO
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		16,791,900	16,791,900	100.00	100.00	KECAMATAN AMPIBABO
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,819,615,429	1,813,297,441	100.00	99.65	KECAMATAN AMPIBABO
6	KECAMATAN KASIMBAR		-	-			-
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	36,650,000	35,840,000	100.00	97.79	KECAMATAN KASIMBAR
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	29,364,400	28,956,400	100.00	98.61	KECAMATAN KASIMBAR
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	70,630,000	64,550,000	100.00	91.39	KECAMATAN KASIMBAR
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	-			
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	2,161,506,206	2,128,802,353	87.50	98.49	KECAMATAN KASIMBAR

7	KECAMATAN TINOMBO SELATAN		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	81,510,950	81,469,950	100.00	99.95	KECAMATAN TINOMBO SELATAN
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	12,908,800	12,902,400	100.00	99.95	KECAMATAN TINOMBO SELATAN
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	33,773,900	33,658,700	100.00	99.66	KECAMATAN TINOMBO SELATAN
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	-			KECAMATAN TINOMBO SELATAN
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	2,242,229,322	2,237,344,972	98.02	99.78	KECAMATAN TINOMBO SELATAN
8	KECAMATAN TINOMBO		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	-	-			KECAMATAN TINOMBO
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	41,581,500	40,420,500	100.00	97.21	KECAMATAN TINOMBO
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	81,614,000	80,004,000	100.00	98.03	KECAMATAN TINOMBO
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		38,722,000	38,700,000	100.00	99.94	KECAMATAN TINOMBO
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,817,432,116	1,806,512,714	100.00	99.40	KECAMATAN TINOMBO
9	KECAMATAN PALASA		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	-	-			KECAMATAN PALASA
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	-	-			KECAMATAN PALASA
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	8,160,000	8,160,000	100.00	100.00	KECAMATAN PALASA
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		93,441,190	93,441,190	100.00	100.00	KECAMATAN PALASA
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	15,196,900	15,196,900	100.00	100.00	KECAMATAN PALASA

6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	1,774,305,434	1,527,905,796	105.21	86.11	KECAMATAN PALASA
10	KECAMATAN MEPANGA						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	24,646,000	24,635,245	100.00	99.96	KECAMATAN MEPANGA
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	38,630,700	38,630,700	100.00	100.00	KECAMATAN MEPANGA
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	66,150,000	66,134,500	100.00	99.98	KECAMATAN MEPANGA
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		31,760,000	31,758,750	100.00	100.00	KECAMATAN MEPANGA
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,881,829,008	1,875,004,219	90.00	99.64	KECAMATAN MEPANGA
11	KECAMATAN BOLANO LAMBUNU		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	88,597,000	68,384,000	71.43	77.19	KECAMATAN BOLANO LAMBUNU
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	31,575,100	30,925,100	100.00	97.94	KECAMATAN BOLANO LAMBUNU
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	51,685,700	49,465,700	97.33	95.70	KECAMATAN BOLANO LAMBUNU
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		29,141,600	28,590,800	100.00	98.11	KECAMATAN BOLANO LAMBUNU
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	2,059,943,215	2,038,362,551	87.92	98.95	KECAMATAN BOLANO LAMBUNU
12	KECAMATAN MOUTONG		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	87,588,800	87,219,350	100.00	99.58	KECAMATAN MOUTONG
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	42,089,000	42,083,800	100.00	99.99	KECAMATAN MOUTONG
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	-	-			KECAMATAN MOUTONG
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		79,346,200	78,835,000	100.00	99.36	KECAMATAN MOUTONG

5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	2,131,457,150	2,123,653,777	100.00	99.63	KECAMATAN MOUTONG
13	KECAMATAN TORIBULU		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	34,530,300	-	-	0.00	KECAMATAN TORIBULU
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	7,109,700	-	-	0.00	KECAMATAN TORIBULU
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	43,140,000	-	-	0.00	KECAMATAN TORIBULU
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		43,204,900	-	-	0.00	KECAMATAN TORIBULU
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,463,479,626	-	-	0.00	KECAMATAN TORIBULU
14	KECAMATAN TAOPA		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	44,632,900	33,948,500	100.00	76.06	KECAMATAN TAOPA
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	48,909,400	32,542,000	100.00	66.54	KECAMATAN TAOPA
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	76,630,000	74,690,000	100.00	97.47	KECAMATAN TAOPA
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		15,393,600	13,185,000	100.00	85.65	KECAMATAN TAOPA
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,709,648,608	1,687,253,574	89.09	98.69	KECAMATAN TAOPA
15	KECAMATAN TOMINI		-	-			
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	73,762,300	69,774,000	100.00	94.59	KECAMATAN TOMINI
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100,135,000	80,873,891	100.00	80.76	KECAMATAN TOMINI
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	-			KECAMATAN TOMINI
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,578,719,570	1,554,126,420	88.89	98.44	KECAMATAN TOMINI
16	KECAMATAN PARIGI BARAT		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	30,923,000	-	-	0.00	KECAMATAN PARIGI BARAT

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	44,023,100	-	-	0.00	KECAMATAN PARIGI BARAT
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	58,109,648	-	-	0.00	KECAMATAN PARIGI BARAT
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		29,204,200	-	-	0.00	KECAMATAN PARIGI BARAT
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,569,880,471	1,100,493,162	15.00	70.10	KECAMATAN PARIGI BARAT
17	KECAMATAN BALINGGI		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	10,840,600	10,617,200	100.00	97.94	KECAMATAN BALINGGI
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	24,949,600	24,784,400	100.00	99.34	KECAMATAN BALINGGI
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	135,585,300	135,328,300	100.00	99.81	KECAMATAN BALINGGI
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		14,287,600	14,240,800	100.00	99.67	KECAMATAN BALINGGI
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,858,248,807	1,815,792,931	100.00	97.72	KECAMATAN BALINGGI
18	KECAMATAN SINIU		-	-			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	4,100,000	4,100,000	100.00	100.00	KECAMATAN SINIU
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	39,690,800	39,690,800	100.00	100.00	KECAMATAN SINIU
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	20,895,000	20,895,000	100.00	100.00	KECAMATAN SINIU
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		17,728,000	17,728,000	100.00	100.00	KECAMATAN SINIU
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,608,658,668	1,599,528,318	82.24	99.43	KECAMATAN SINIU
19	KECAMATAN PARIGI UTARA						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	11,084,600	7,109,600	150.00	64.14	KECAMATAN PARIGI UTARA

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	15,798,700	15,798,700	150.00	100.00	KECAMATAN PARIGI UTARA
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	23,100,000	23,100,000	-	100.00	KECAMATAN PARIGI UTARA
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		10,213,200	10,213,200	150.00	100.00	KECAMATAN PARIGI UTARA
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,733,960,645	1,716,102,849	173.33	98.97	KECAMATAN PARIGI UTARA
20	KECAMATAN PARIGI TENGAH						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	9,881,600	9,881,600	100.00	100.00	KECAMATAN PARIGI TENGAH
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	19,642,600	19,742,600	100.00	100.51	KECAMATAN PARIGI TENGAH
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	21,560,000	21,560,000	100.00	100.00	KECAMATAN PARIGI TENGAH
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		31,590,800	31,590,800	100.00	100.00	KECAMATAN PARIGI TENGAH
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	2,427,582,848	2,383,992,848	100.00	98.20	KECAMATAN PARIGI TENGAH
21	KECAMATAN ONGKA MALINO						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	6,314,900	6,312,705	100.00	99.97	KECAMATAN ONGKA MALINO
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	80,806,200	55,617,700	100.00	68.83	KECAMATAN ONGKA MALINO
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	99,595,100	73,438,499	100.00	73.74	KECAMATAN ONGKA MALINO
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	-			KECAMATAN ONGKA MALINO

5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,329,534,521	1,272,569,021	85.83	95.72	KECAMATAN ONGKA MALINO
22	KECAMATAN BOLANO						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	-	-			KECAMATAN BOLANO
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	55,359,800	49,299,000	100.00	89.05	KECAMATAN BOLANO
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	127,705,600	117,670,500	100.00	92.14	KECAMATAN BOLANO
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		85,540,000	28,185,000	100.00	32.95	KECAMATAN BOLANO
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1,701,093,211	463,969,258	75.00	27.27	KECAMATAN BOLANO
23	KECAMATAN SIDOAN SIDOAN						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dikecamatan	-	-			KECAMATAN SIDOAN
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK aktif	43,593,600	-	-	0.00	KECAMATAN SIDOAN
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	20,731,900	-	-	0.00	KECAMATAN SIDOAN
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		43,230,000	-	-	0.00	KECAMATAN SIDOAN
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi dan BMD penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	11,342,800	-	-	0.00	KECAMATAN SIDOAN

LAMPIRAN IV

**REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024**

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	26.448.081.000,00	27.352.098.094,90	103,42	23.803.599.245,46
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	17.648.311.200,00	17.563.244.767,00	99,52	14.626.496.079,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	7.062.433.158,00	7.175.716.029,00	101,6	7.308.124.029,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	96.008.555.601,00	93.586.089.222,70	97,48	105.679.385.353,66
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		147.167.380.959,00	145.677.148.113,60	98,99	151.417.604.707,12
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	1.597.442.446.000,00	1.581.652.462.933,00	99,01	1.519.743.272.120,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	85.588.190.032,00	76.042.302.066,00	88,85	72.551.937.219,00
11	Jumlah Pendapatan Transfer		1.683.030.636.032,00	1.657.694.764.999,00	98,49	1.592.295.209.339,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	5.1.1.3				
13	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	2.971.568.730,00	2.694.873.250,00	90,69	2.784.127.007,00 0,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	23.295.272.703,00	19.752.916.346,00	84,79	0,00
15	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		26.266.841.433,00	22.447.789.596,00	85,46	2.784.127.007,00
16	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.856.464.858.424,00	1.825.819.702.708,60	98,35	1.746.496.941.053,12
17	BELANJA DAERAH	5.1.2				
18	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
19	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	679.427.039.767,72	668.708.469.509,00	98,42	630.041.917.271,00
20	Belanja Barang dan jasa	5.1.2.1.2	503.015.595.258,28	476.241.054.690,64	94,68	528.001.154.156,80
21	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	95.000.000,00	91.004.047,01	95,79	158.373.089,00
22	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	142.810.327.662,00	140.127.232.313,00	98,12	104.420.301.218,00
23	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	2.429.003.075,00	2.425.683.600,00	99,86	2.764.651.250,00
24	Jumlah Belanja Operasi		1.327.776.965.763,00	1.287.593.444.159,65	96,97	1.265.386.396.984,80
25	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
26	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	734.010.000,00	630.535.000,00	85,9	698.220.000,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	48.341.351.366,00	44.184.981.772,00	91,4	87.126.556.041,00
28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	56.387.639.580,00	47.308.704.062,56	83,9	48.904.164.451,00
29	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	80.560.171.718,00	76.878.754.824,00	95,43	77.201.512.634,00

30	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	5.958.687.650,00	7.080.658.750,00	118,83	7.275.944.500,00 0,00
31	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.527.320.860,00	1.247.680.576,00	81,69	0,00
32	Jumlah Belanja Modal		193.509.181.174,00	177.331.314.984,56	91,64	221.206.397.626,00
33	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
34	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	8.527.311.400,00	7.494.076.981,00	87,88	3.051.237.500,00
35	Jumlah Belanja Tidak Terduga		8.527.311.400,00	7.494.076.981,00	87,88	3.051.237.500,00
36	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
37	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	3.331.099.075,00	2.860.764.889,00	85,88	2.575.077.892,00
38	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	332.814.293.700,00	331.121.089.269,00	99,49	331.293.016.115,00
39	Jumlah Belanja Transfer		336.145.392.775,00	333.981.854.158,00	99,36	333.868.094.007,00
40	JUMLAH BELANJA DAERAH		1.865.958.851.112,00	1.806.400.690.283,21	96,81	1.823.512.126.117,80
41	SURPLUS/DEFISIT		9.493.992.688,00	19.419.012.425,39	204,54	77.015.185.064,68
42	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
43	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
44	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	13.960.659.388,00	13.960.659.388,00	100	92.675.844.451,33
45	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		13.960.659.388,00	13.960.659.388,00	100	92.675.844.451,33
46	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
47	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00
48	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.2	466.666.700,00	466.666.700,00	100	700.000.000,00
49	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		4.466.666.700,00	4.466.666.700,00	100	1.700.000.000,00
50	PEMBIAYAAN NETTO		9.493.992.688,00	9.493.992.688,00	100	90.975.844.451,33
51	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.4	0,00	28.913.005.145,04	0,00	13.960.659.386,65